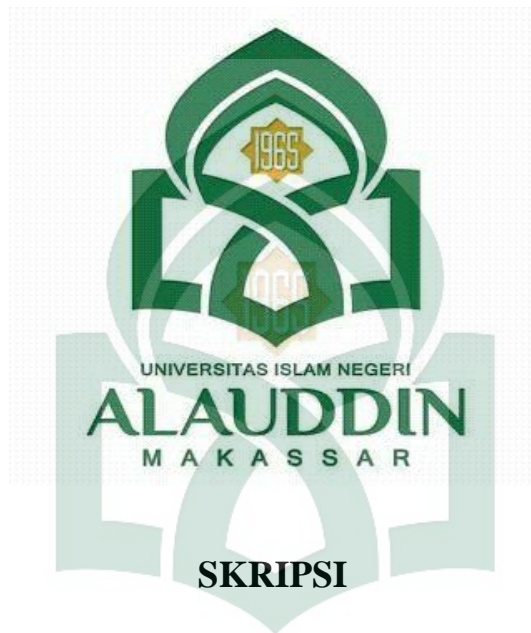


**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA SEKTOR  
INDUSTRI PENGOLAHAN DI PROVINSI  
SULAWESI SELATAN PERIODE  
2006-2015**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Jurusan Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
UIN Alauddin Makassar

**Oleh :**

**ADIL**  
**NIM. 10700113126**

**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adil  
NIM : 10700113126  
Tempat/Tgl.Lahir : Bulukumba, 12 Januari 1994  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Alamat : Jln. Tamangapa Raya No. 5 Makassar  
Judul : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan  
Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi  
Sulawesi Selatan Periode 2006-2015.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar dan hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Agustus 2017  
Penyusun,

Adil  
NIM: 10700113126



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923  
Kampus II Jl. Slt. Alauddin No. 36 SamataSungguminasa – GowaTlp.424835 Fax. 424836

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Skripsi Saudara Adil, Nim: 10700113126, Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul *“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2006-2015”* memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, Jum'at 19 Mei 2017

Pembimbing I

Dr. Amiruddin K. S.Ag., M.Ei  
NIP. 1964 0908 19903 1001

Pembimbing II

Aulia Rahman, S.E., M.Si.,  
NIDN. 2026118401



## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2006-2015*", yang disusun oleh **Adil**, NIM: **10700113126**, mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam siding munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017. Bertepatan dengan 7 Dzulqadah 1438 H. dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ilmu Ekonomi (dengan beberapa perbaikan).


Makassar, 31 Juli 2017.  
7 Dzulqadah 1438 H.

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.	(.....)
Munaqasyah I	: Dr. Mudassir, SE., MM., Ak.	(.....)
Munaqasyah II	: Muh. Akil Rahman, SE., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Amiruddin K., S.Ag., M.Ei.	(.....)
Pembimbing II	: Aulia Rahman. SE., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Alauddin Makassar,

  
Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag  
NIP: 19581022 198703 1 002

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan puja bagi Allah, Tuhan Semesta Alam Yang Pemurah lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang lebih indah dan pantas penulis ucapkan selain puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini meskipun sangat sederhana. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW, merupakan sosok manusia yang diberikan keistimewaan oleh Allah SWT untuk mengajarkan agama Allah (Dinul Islam) dan membawa manusia dari jalan yang gelap ke jalan yang terang benderang, Rahmatan Lil alamin.

Skripsi yang berjudul ***“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2006-2015”*** guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam kesempatan manis ini, penulis bersyukur dilahirkan dan dibesarkan dari malaikat-malaikat Tuhan (Ayahanda Muhammad Asri dan ibunda Marhumah). Sepanjang ingatan, sepanjang napas terhembus, tangan-tangan kasar mereka, nasehat-nasehat mereka, cinta kasih mereka, mengalir ikhlas berupa kekuatan penyemangat

untuk lebih hidup lagi. Tak lupa pula penulis ucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudaraku, Suryani kakak perempuan saya tercinta, adek laki-laki saya, Indra, Ariel, Keponakan saya, sang motivator pujangga hati, Nuratul Awalia, kepada mereka semua yang hampir menghabiskan separuh asa, mereka hadir dengan cinta yang tulus. Merekalah kekuatan dan penyemangat saya. Terima kasih juga yang sebesar besarnya kepada keluarga besarku, Kakek H. Cama, Nenek Hj. Dahlia, Kakek Tahin alm, Nenek Sallan, Om Adam beserta istrinya Tante Hasmiati, Om Tiling beserta istrinya Tante Haro, yang telah banyak membantu baik berupa dukungan materi maupun moril dan kepada Om Kulle alm, beserta istrinya Almarhumah Tante Masi, begitu besar dan cinta Allah untukmu yang telah memangilmu terlebih dahulu kembali kesisinya sebelum penulis menyelesaikan tugas akhir ini yang telah banyak membantu penulis semasa hidupnya, semoga Allah SWT membalas kebajikan dan ditempatkan diantara tempat orang-orang yang beriman (Surga), Aaamiin.

Beberapa tahun menjadi mahasiswa, sampai benar-benar tiba di proses akhir, banyak pundak buat bersandar, banyak lengan buat air mata. Karena itu, penulis menuliskanya dalam karya ini untuk sebuah keabadian.

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar dan para wakil Rektor serta seluruh jajarannya yang senantiasa mencurahkan dedikasinya dengan penuh keikhlasan dalam rangka pengembangan mutu dan kualitas mahasiswa UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar serta para wakil dekan yang senantiasa

memberikan dedikasinya dengan penuh keikhlasan dalam rangka pengembangan mutu dan kualitas mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Bapak Dr. Siradjuddin, SE., M.Si dan Hasbiullah, SE., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas segala kontribusi, bantuan dan bimbingannya selama ini.
4. Bapak Dr. Amiruddin, K.S.Ag., M.Ei pembimbing I dan Aulia Rahman, S.E., M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Untuk penguji komprehensif Dr. Siradjuddin, SE., M.Si, Dr. Amiruddin, K.S.Ag., M.Ei dan Hasbiullah, S.E., M.Si yang telah mengajarkan kepada penulis arti sebuah perjuangan serta pengorbanan untuk menggapai kesuksesan.
6. Untuk penguji ujian munaqasyah I Dr. Mudassir, SE., M.m.Ak. dan penguji ujian munaqasyah II Muh. Akil Rahman, SE, M.Si. yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

8. Nurmia Muin, S.Ip., M.M sebagai ketua Staf akademik, serta Staf perpustakaan, dan Staf Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Pegawai dan Staff P2T-BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan atas bantuannya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih buat teman-teman seangkatan ILMU EKONOMI 2013 yang telah mengajarkan penulis arti kekeluargaan, tanggung jawab dan kepedulian. Terima kasih atas segala kebersamaan, motivasi serta dukungannya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada teman ILMU EKONOMI 2013 khususnya kelas ekonomi c untuk Muh. Asis, Mulyadi Ahmad, Nasaruddin, Supriyanto, Sukrin, Asdar, Khuslin, Ashar, Sriani Idris, Nurlaela, Rasdiana, Dewi dan kepada teman lainya yang tak sempat saya sebutkan satu persatu. Kalian luar biasa akan warna-warni persahabatan kita selama ini.
12. Terima kasih kepada teman ILMU EKONOMI kepada muhammad syaripuddin, Kak Arya, Kak Rahmi, Kak Surya, atas kebersamaanya dalam setiap tahap proses tugas akhir ini yang selalu memberikan dukungan sekaligus memberikan dorongan semangat.
13. Seluruh teman-teman KKN Profesi Angkatan 53 Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa terutama Desa Maccini Baji, Abdul Khalik Syam, Rika Nurjannah, Kiki dan Uki. Dua bulan merupakan waktu yang sangat berharga



bagi hidup penulis karena bersama teman-teman yang luar biasa dan tak akan pernah terlupakan.

14. Buat para ALUMNI SMA NEGERI 12 BULUKUMBA Tahun 2013 dan para sahabat IPS serta teman satu kontrakan, Zaenal, Firmanyah, Alif Abadi, Haerul, Andi Khaerul dan Ajis yang sampai saat ini selalu memberikan dukungan, semangat serta motivasi untuk bisa menyusun skripsi ini yang selalu mengingatkan bahwa tujuan kita merantau ke Makassar adalah untuk menuntut ilmu bukan untuk berhura-hura dan berhahahaha.
15. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan penulis secara terkhusus. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi dan memberikan berkah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Dengan segenap kerendahan hati, penulis berharap semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk penelitian yang lebih baik di masa yang akan datang dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Gowa, 2017

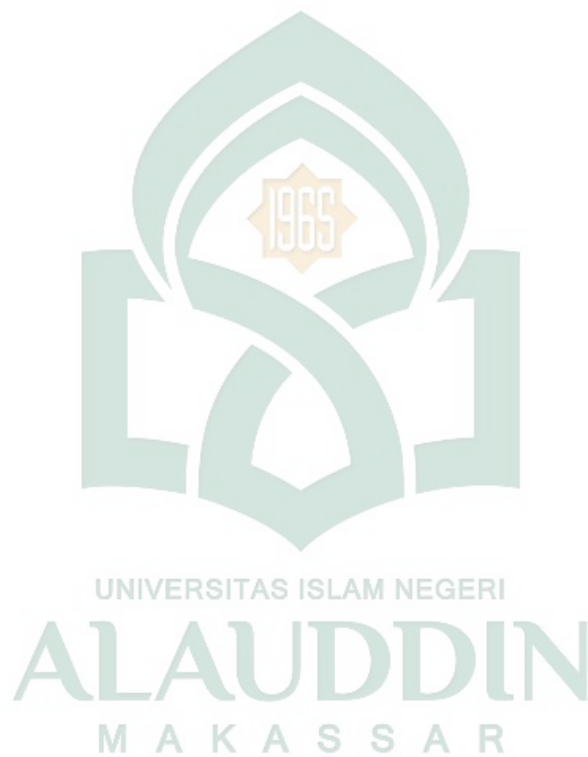
Penulis

**Adil**  
NIM. 10700113126

## DAFTAR ISI

<b>Sampul .....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>x</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	15
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>16</b>
A. Teori Industri.....	16
B. Teori Tenaga Kerja .....	21
C. Teori Investasi.....	24
D. Teori UMR.....	27
E. Teori Belanja Pemerintah.....	28
F. Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja .....	34
G. Pengaruh UMP Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	36
H. Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja....	37
I. Penelitian Terdahulu.....	39
J. Kerangka Pikir .....	41
K. Hipotesis.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	45
B. Metode Pengumpulan Data .....	45
C. Metode Analisis Data.....	46
D. Definisi Operasional.....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan .....	51
B. Deskripsi Perkembangan Variabel.....	54
C. Hasil Penelitian .....	59
D. Pembahasan Hasil Penelitian .....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah tenaga kerja pada sektor industri pengolahan periode 2006–2015 .....	9
Tabel 1.2 Jumlah tingkat investasi pada sektor industri pengolahan periode 2006–2015 .....	11
Tabel 1.3 Jumlah upah minimum regional pada sektor industri pengolahan periode 2006–2015 .....	12
Tabel 1.4 Jumlah belanja pemerintah pada sektor industri pengolahan periode 2006–2015 .....	13
Tabel 2.1 Klasifikasi industri menurut banyaknya tenaga kerja .....	20
Tabel 4.1 Jumlah tenaga kerja pada sektor industri pengolahan periode 2006–2015 .....	54
Tabel 4.2 Jumlah tingkat investasi pada sektor industri pengolahan periode 2006–2015 .....	56
Tabel 4.3 Jumlah upah minimum regional pada sektor industri pengolahan periode 2006–2015 .....	57
Tabel 4.4 Jumlah Belanja Pemerintah pada sektor industri pengolahan periode 2006–2015 .....	58
Tabel 4.5 Uji Multikolinieritas.....	61
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi .....	64
Tabel 4.7 Rekapitulasi Hasil Uji Regresi .....	64
Tabel 4.8 Uji F .....	66
Tabel 4.9 Uji t .....	67
Tabel 4.10 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	69



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	42
Gambar 4.1 Grafik Histogram.....	60
Gambar 4.2 Grafik Uji Normalitas.....	60
Gambar 4.3 Grafik Scatterplot .....	63



## ABSTRAK

**Nama : Adil**

**Nim : 10700113126**

**Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan  
Tenaga Kerja pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi  
Sulawesi Selatan periode 2006-2015**

---

Penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu investasi, upah minimum provinsi dan belanja pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh investasi, upah minimum provinsi dan belanja pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2006-2015. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan tolak ukur bagi pemerintah maupun swasta untuk lebih memperhatikan tingkat penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data *time series*. Penelitian ini dibatasi dengan menganalisis data sekunder kuantitatif tahunan pada rentang waktu antara tahun 2006-2015. Dengan teknik pengolahan data menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis serta menganalisis data dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan *software SPSS 21 for windows*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel investasi, upah minimum provinsi dan belanja pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sedangkan secara parsial variabel investasi berpengaruh tidak signifikan namun berhubungan positif dan upah minimum provinsi berpengaruh tidak signifikan dan berhubungan negatif sedangkan belanja pemerintah berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari hasil regresi yang telah dilakukan maka diperoleh nilai *R-square* ( $R^2$ ) sebesar 0.836, ini berarti variasi variabel independen menjelaskan variasi variabel dependen sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 83.6% dan sisanya variasi variabel lain dijelaskan di luar model penelitian sebesar 16.4%.

**Kata kunci: Penyerapan Tenaga Kerja, Investasi, UMR dan Belanja Pemerintah**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses multidimensial yang meliputi perubahan struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan (institusi) nasional. Pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok yaitu: meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses kegiatan ekonomi.<sup>1</sup>

Pembangunan yaitu suatu upaya untuk mencapai pertumbuhan kesejahteraan sosial, yaitu berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu Negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat,. Pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila mampu meningkatkan kesejahteraan dalam arti luas.<sup>2</sup> Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan serangkaian usaha kebijaksanaan pemerintah dalam mencapai suatu hasil yang positif yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat,

---

<sup>1</sup> Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* Trans Haris Munandar (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 91.

<sup>2</sup> Suroto, *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), h. 21.

memperluas kesempatan kerja dengan diimbangi jumlah lapangan pekerjaan yang terus meningkat juga dan mengarahkan pembagian pendapatan secara merata di setiap lapisan daerah.

Pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh tenaga kerja, pada kenyataan tenaga kerja merupakan kendaraan yang akan mendorong pembangunan ekonomi. Suatu harapan dalam pembangunan yaitu mengarah pada pembangunan ekonomi yang dapat dimulai dan dilaksanakan oleh komponen tenaga kerja. Tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi merupakan salah satu alasan komponen tenaga kerja dalam perekonomian yang memiliki dampak langsung pada tingkat pembangunan ekonomi di suatu daerah.

Dalam teori klasik menganggap bahwa manusia merupakan faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat. Hal ini disebabkan karena tanah tidak akan ada artinya jika tidak ada sumber daya manusia yang dapat mengolahnya. Dan dalam hal ini teori klasik Adam Smith, juga menyatakan bahwa alokasi sumber daya manusia yang bersifat efektif adalah pemula pembangunan ekonomi. Jika sumber daya manusia dapat bersifat efektif maka akan mampu memberikan sumbangsi terhadap pembangunan. Sehingga dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia adalah faktor utama dalam pembangunan.<sup>3</sup>

Tenaga kerja menjadi faktor yang sangat penting dalam proses produksi. Tanpa adanya tenaga kerja, proses produksi tidak bisa berjalan dengan lancar. Namun di sisi lain, tenaga kerja bisa menimbulkan berbagai masalah, antara lain

---

<sup>3</sup> Gregory Mankiw, *Makroekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 280.



jumlah pengangguran tinggi, jumlah angkatan kerja yang semakin meningkat, mutu tenaga kerja yang rendah, dan lain sebagainya. Masalah tersebut menjadi salah satu penghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu perlu adanya peran pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.<sup>4</sup>

Selain tenaga kerja sebagai faktor utama, tenaga kerja yang melimpah akan menjadi suatu masalah yang akan menjadi perhatian utama pemerintah dari masa ke masa karena hal ini memiliki kaitan erat dengan pengangguran baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masalah ketenagakerjaan menunjukkan bahwa semakin tinggi angka pengangguran maka akan meningkatkan probabilitas kemiskinan, kriminalitas, dan fenomena-fenomena sosial-ekonomi di masyarakat.

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Salah satu tujuan penting dalam pembangunan ekonomi adalah penyediaan lapangan pekerjaan yang cukup untuk mengejar pertumbuhan angkatan kerja, yang pertumbuhannya lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja atau lapangan kerja. Keberhasilan suatu pembangunan ekonomi yaitu dilihat dari kesanggupan dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Masalah kesempatan kerja merupakan masalah penting dalam makro ekonomi karena tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi. Manusia sebagai faktor utama dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, manusia yang diciptakan oleh Allah SWT dengan segala kelebihanannya, manusia diperintahkan oleh Allah mencari rezeki yang ada dimuka bumi ini.

---

<sup>4</sup> Sony Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), h. 43.

Hal ini tercermin dalam firman Allah Swt dalam QS. Ali Imran (3): 114

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وُسْرَعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾

Terjemahnya:

*Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera kepada (mengerjakan) berbagai kebajikan mereka itu termasuk orang-orang yang saleh.*<sup>5</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia untuk betu-betul mau berusaha dan bekerja secara maksimal untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan halal bagi keluarganya agar terhindar dari yang mungkar dan tetap berada di jalan Allah SWT agar apa yang didapatkannya menjadi berkah bagi keluarganya.

Sebagaimana yang tertera dalam Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10 Allah Berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا  
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

*Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*<sup>6</sup>

Berdasarkan bunyi ayat di atas Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk “*bertebaranlah kamu dimuka bumi*” makna dari arti potongan ayat

<sup>5</sup> Departemen Agama RI. Al-Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemahannya (CV. Penerbit JART, 2005), h. 64.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Depok: al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002), h. 554.

tersebut yaitu Allah SWT memerintahkan kepada hambanya untuk mencari rezeki dengan bekerja dan mencari nafkah. Melihat pada QS al-Jumuah ayat 10 sebagaimana Allah SWT dalam ajaran agama Islam diperintah untuk senantiasa berdisiplin dalam menunaikan ibadah wajib seperti shalat, dan selalu giat berusaha atau bekerja sehingga memperoleh rezeki yang halal. Allah SWT juga senantiasa memerintahkan untuk selalu mengingat Allah SWT atas segala karunianya, dengan selalu mengingat Allah SWT agar hambanya tidak mudah putus asa dalam mencari kerja dengan banyaknya jumlah orang yang bersaing untuk mendapatkan pekerjaan.

Melonjaknya pertumbuhan penduduk suatu wilayah yang diiringi dengan penambahan angkatan kerja telah menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks. Hal ini disebabkan karena belum berfungsinya semua sektor kehidupan masyarakat dengan baik serta belum meratanya pembangunan disegala bidang sehingga ketersediaan lapangan pekerjaan tidak seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan dinamis.

Adanya berbagai sektor tidak mampu memenuhi dan menyerap angkatan kerja yang terus meningkat secara maksimal yang disebabkan adanya ketimpangan antara pertumbuhan angkatan kerja yang tumbuh dengan cepat dan lapangan kerja yang tersedia. Dalam masalah penyerapan tenaga kerja akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Sektor industri pengolahan digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena dilihat mampu menyerap sebagian besar jumlah penduduknya dalam kegiatan yang dilakukan pada sektor industri pengolahan walaupun hasilnya belum memuaskan.

Terbatasnya lapangan kerja yang tersedia di Provinsi Sulawesi Selatan tidak seimbang dengan penambahan jumlah angkatan kerja sehingga berdampak pada tingginya jumlah pengangguran. Pada hakekatnya, tingginya angka pengangguran akan berdampak pada pembangunan ekonomi yang memiliki satu serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. Kebijakan perluasan kesempatan kerja merupakan suatu kebijakan penting dalam pelaksanaan pembangunan karena salah satu tolok ukur untuk menilai keberhasilan ekonomi suatu wilayah adalah kesempatan kerja yang diciptakan oleh adanya pembangunan ekonomi.<sup>7</sup>

Pentingnya peranan industri pengolahan dalam proses pembangunan ekonomi khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan berkaitan dengan kondisi pembangunan ekonomi. Setiap jenis industri pasti mengharapkan bisa menghasilkan keuntungan, baik itu industri besar maupun industri kecil. Tingkat keuntungan suatu industri merupakan pencerminan keberhasilan suatu industri tersebut akan mampu memenuhi kewajibannya dan lebih berpotensi berkembang. Perkembangan suatu industri sebagian besar di pengaruhi tenaga kerjanya, semakin baik produktivitas tenaga kerja, semakin banyak hasil produksinya. Setiap wilayah seperti Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pembangunannya mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pemerataan, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya.

---

<sup>7</sup> Oktaviana Dwi Saputri dan Tri Wahyu Rejekiningsih, *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja* (Gramedia Pustaka, 2007), h. 5.



Salah satu cara untuk memperluas kesempatan kerja adalah melalui pengembangan industri terutama industri yang bersifat padat karya. Perkembangan dapat terwujud melalui investasi swasta maupun pemerintah. Maka dengan adanya investasi yang nantinya memberikan atau menciptakan peluang bagi pelaku ekonomi untuk memperluas usaha atau lapangan kerja sehingga menyebabkan kapasitas produksi meningkat dan menciptakan kesempatan kerja. Selain investasi swasta terdapat investasi pemerintah yang juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Provinsi Sulawesi Selatan meletakkan sektor industri pengolahan sebagai sektor unggul (*leading sector*) pada strategi pembangunan ekonomi, karena dengan adanya sektor industri pengolahan ini dapat membantu untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.<sup>8</sup>

Industrialisasi merupakan suatu proses interaksi antara pengembangan teknologi, inovasi, spesialisasi dalam produksi dan perdagangan antar negara yang pada akhirnya sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita yang mendorong perubahan struktur ekonomi. Oleh karena itu, proses industrialisasi didalam perekonomian sering juga diartikan sebagai proses perubahan struktur ekonomi.<sup>9</sup>

Proses pembangunan sering kali dikaitkan dengan proses industrialisasi. Proses industrialisasi dan pembangunan industri sebenarnya merupakan salah satu jalur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Dengan kata lain pembangunan

---

<sup>8</sup>Suroto, *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), h. 17.

<sup>9</sup> Muhammad Teguh, *Ekonomi Industri* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), h. 7.

industri merupakan satu fungsi dari tujuan pokok kesejahteraan rakyat, bukan merupakan kegiatan yang mandiri untuk hanya sekedar mencapai pembangunan.

Sejalan dengan hal tersebut maka peran sektor industri semakin penting, sehingga sektor industri mempunyai peranan sebagai sektor pemimpin atau *Leading Sektor*, peranan sektor industri dalam perekonomian suatu wilayah terlihat dalam kontribusi atau sumbangan sektor industri.<sup>10</sup>

Industrialisasi mulai digalakkan dari waktu ke waktu dengan salah satu tujuannya adalah untuk dapat menyerap tenaga kerja yang semakin meningkat dengan semakin tingginya laju pertumbuhan penduduk. Industri secara umum yaitu pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau mengolah barang jadi agar lebih tinggi nilainya. Tujuan lain diharapkan dapat tercapai melalui pembangunan industri adalah Semakin luasnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Untuk mengembangkan sektor industri perlu adanya investasi yang memadai agar pengembangan sektor industri dapat berjalan sesuai tujuan. Usaha akumulasi modal dapat dilakukan dengan melalui kegiatan investasi yang akan menggerakkan perekonomian melalui mekanisme permintaan agregat, dimana akan meningkatkan usaha produksi dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan permintaan tenaga kerja.

Sektor industri pengolahan ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja. Di Provinsi Sulawesi Selatan dan diharapkan mampu untuk meningkatkan

---

<sup>10</sup> Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1997), h. 17.

kesejahteraan masyarakat dengan adanya sektor industri pengolahan ini maka dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang sedang mencari kerja. Adapun data penyerapan tenaga kerja pada sektor industry di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2006–2015**

<b>N0</b>	<b>Tahun</b>	<b>Penyerapan Tenaga Kerja (Jiwa)</b>
1	2006	41.187
2	2007	46.069
3	2008	40.775
4	2009	46.069
5	2010	43.347
6	2011	35.692
7	2012	54.608
8	2013	56.436
9	2014	57.540
10	2015	64.191

*Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, tahun 2016.*

Pada tabel 1.1 menunjukkan jumlah tenaga kerja yang diserap pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dilihat bahwa penyerapan tenaga kerja dari tahun mengalami fluktuasi dari tahun ke tahunnya. Angka penyerapan tenaga kerja tertinggi terdapat pada tahun 2015 sebanyak 64.191 jiwa. Dari tahun 2012 sampai 2015 mengalami peningkatan dibandingkan dari tahun 2011 yang merupakan angka terendah tingkat penyerapan tenaga kerjanya. penyerapan tenaga kerja pada tahun 2011 yaitu sebanyak 35.692 jiwa. Investasi pada tahun 2011 mengalami peningkatan tetapi jumlah penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan hal ini disebabkan karena investasi tahun 2011 lebih tertuju

pada pembelian mesin sehingga berdampak atau menurunkan jumlah penyerapan tenaga kerja pada tahun 2011 pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Gambaran penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat di atas, bahwa penyerapan tenaga kerja mengalami fluktuasi hal ini disebabkan karena adanya penggantian fungsi produksi yaitu penggunaan tenaga kerja manusia beralih ke teknologi, dimana penguasaan teknologi dan penggunaan mesin-mesin yang lebih modern akan menyebabkan penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan. Peningkatan dan penurunan jumlah tenaga kerja juga sangat dipengaruhi oleh keadaan perekonomian secara umum karena dengan perekonomian yang maju maka pendapatan masyarakat ikut meningkat, hal ini akan memotivasi para investor untuk mengadakan perluasan produksi dengan demikian akan mampu membuka lapangan pekerjaan yang baru.

Penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu investasi, UMR dan belanja pemerintah. Investasi memegang peranan penting pada sektor industri pengolahan bagaimanapun juga investasi akan menimbulkan peluang bagi pelaku ekonomi untuk memperluas usahanya serta memperbaiki sarana-sarana produksi, sehingga dapat meningkatkan output yang nantinya dapat memperluas kesempatan kerja yang lebih banyak dan keuntungan yang lebih besar dan kemudian dana yang didapat diputar lagi untuk investasi dan diharapkan dengan adanya kenaikan yang berkelanjutan dari usaha tersebut sehingga akan berdampak pada penyerapan



tenaga kerja yang akan semakin meningkat.<sup>11</sup> Adapun data investasi dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah investasi pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2006–2015**

No	Tahun	Investasi (Rp)
1	2006	1.896.616.313
2	2007	3.841.937.157
3	2008	4.842.996.003
4	2009	5.986.722.123
5	2010	3.213.409.048
6	2011	4.222.936.000
7	2012	5.884.130.000
8	2013	8.579.410.000
9	2014	9.884.510.000
10	2015	11.604.481.781

*Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, tahun 2016.*

Tahun 2010 terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 3.213.409.048. Hal ini disebabkan oleh tingkat inflasi yang terjadi, tingkat inflasi yang terjadi pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat suku bunga dan keadaan ekonomi secara makro yang akan mengakibatkan perubahan pada jumlah investasi yang akan dilakukan oleh investor.

Upah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja, teori upah menjelaskan bahwa upah ditentukan oleh pertemuan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi industri. Berdasarkan teorinya, upah yang tinggi akan membuat biaya produksi industri juga meningkat. Akibatnya, harga suatu produk

---

<sup>11</sup> Abdul Halim, *Analisis Investasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2005), h. 4.

juga meningkat, hal ini menurunkan jumlah permintaan menurun yang nantinya menurunkan jumlah permintaan tenaga kerja. Adapun data UMR dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.3**  
**Jumlah UMR pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan**  
**periode 2006–2015**

No	Tahun	Upah Minimum Regional (Rp)
1	2006	510.000
2	2007	612.000
3	2008	679.000
4	2009	950.000
5	2010	1.000.000
6	2011	1.100.000
7	2012	1.200.000
8	2013	1.440.000
9	2014	1.800.000
10	2015	2.000.000

*Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, tahun 2016.*

Secara umum, kondisi UMR di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hal ini seiring dengan semakin tingginya harga berbagai macam kebutuhan hidup masyarakat. Dari tahun 2006 sampai tahun 2015 tiap tahun meningkat berkisar sebesar Rp. 200.000 pada setiap tahunnya. Namun yang terjadi, besarnya upah yang ditetapkan tersebut belum mampu mencukupi kebutuhan hidup para tenaga kerja.

. Belanja pemerintah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah penyerapan tenaga kerja karena jumlah penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh belanja pemerintah. Belanja pemerintah merupakan dana yang digunakan untuk membeli produk berdasarkan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk

membeli dan menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat.

Total belanja pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (pusat – propinsi – daerah). Sehingga jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah akan memberikan pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan. Semakin besar keputusan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah maka akan mempengaruhi jumlah output yang akan dihasilkan oleh sektor industri. Adapun data belanja pemerintah dapat dilihat pada tabel 1.4 di bawah ini:

**Tabel 1.4**  
**Jumlah belanja pemerintah pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2006–2015**

No	Tahun	Belanja Pemerintah (Rp)
1	2006	307.138.061
2	2007	4.040.875.168
3	2008	4.288.562.753
4	2009	3.699.444.799
5	2010	4.288.562.753
6	2011	3.699.444.799
7	2012	4.151.911.913
8	2013	6.213.947.459
9	2014	10.584.611.566
10	2015	12.118.469.111

*Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, tahun 2016.*

Belanja pemerintah (belanja langsung) mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dari tahun 2006 sampai 2015, hal ini disebabkan karena selama ini belanja pemerintah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang

produktif. Seharusnya, alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya.

Berdasarkan pada kenyataan-kenyataan yang telah dijelaskan diatas maka menarik untuk mengamati masalah penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan. Judul penelitian yang akan diangkat yaitu **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2006-2015”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah investasi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2006-2015?
2. Apakah UMR berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2006-2015?
3. Apakah belanja pemerintah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2006-2015?
4. Apakah investasi, UMR dan belanja pemerintah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2006-2015?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah investasi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2006-2015.
2. Untuk mengetahui apakah UMR berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2006-2015.
3. Untuk mengetahui apakah belanja pemerintah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2006-2015.
4. Untuk mengetahui apakah investasi, UMR dan belanja pemerintah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2006-2015.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Berguna sebagai salah satu informasi dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel tersebut di atas yang mempengaruhi jumlah penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan serta dapat dijadikan salah satu referensi bagi para peneliti yang akan datang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Teori Industri**

##### **1. Definisi Industri**

Istilah industri berasal dari bahasa latin, yaitu *industria* yang artinya buruh atau tenaga kerja. Istilah industri sering digunakan secara umum dan luas, yaitu semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka mencapai kesejahteraan. Definisi industri menurut Sukirno adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor sekunder. Kegiatan itu antara lain adalah pabrik tekstil, pabrik perakitan dan pabrik pembuatan rokok. Industri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengolah barang mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi untuk dijadikan barang yang lebih tinggi kegunaannya.<sup>1</sup>

Dalam pengertian yang sempit, industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Secara umum pengertian industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.

---

<sup>1</sup> Sukirno Sadono, 1995, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro, Edisi kedua*, Jakarta : PT. Karya Grafindo Persada. h. 54.



Industri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Selain itu industrialisasi juga tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancangan bangun dan perekayasaan industri. Dari sudut pandang geografi, Industri sebagai suatu sistem, merupakan perpaduan sub sistem fisis dan sub sistem manusia.<sup>2</sup>

Industri mencakup semua usaha dan kegiatan dibidang ekonomi yang bersifat produktif. Sedangkan pengertian industri atau industri pengolahan adalah suatu kegiatan yang mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dalam hal ini termasuk kegiatan jasa industri dan pekerja perakitan (*assembling*). Dalam istilah ekonomi, industri mempunyai dua pengertian. Pertama, industri merupakan himpunan perusahaan-perusahaan sejenis, contoh industri kertas berarti himpunan perusahaan-perusahaan penghasil kertas. Kedua, industri adalah sektor ekonomi yang didalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.<sup>3</sup>

Dalam pengertian kedua, kata industri sering disebut sektor industri pengolahan/manufaktur yaitu salah satu faktor produksi atau lapangan usaha

---

<sup>2</sup> Sritomo Wignjosoebroto, 2003, *Pengantar Teknik & Manajemen Industri* Edisi Pertama, Jakarta : Penerbit Guna widya h. 19.

<sup>3</sup> Muhammad Teguh, *Ekonomi Industri* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), h. 1.

dalam perhitungan pendapatan nasional menurut pendekatan produksi. Pengertian industri adalah: Suatu unit atau kesatuan produk yang terletak pada suatu tempat tertentu yang meletakkan kegiatan untuk mengubah barang-barang secara mekanis atau kimia, sehingga menjadi barang (produk yang sifatnya lebih dekat pada konsumen terakhir), termasuk disini memasang bahagian dari suatu barang (*assembling*).<sup>4</sup>

Ketika satu negara telah mencapai tahapan dimana sektor industri sebagai *leading sector* maka dapat dikatakan negara tersebut sudah mengalami industrialisasi. Dapat dikatakan bahwa industrialisasi sebagai transformasi struktural dalam suatu negara. Oleh sebab itu, proses industrialisasi dapat didefinisikan sebagai proses perubahan struktur ekonomi dimana terdapat kenaikan kontribusi sektor industri dalam permintaan konsumen, PDB, ekspor dan kesempatan kerja.

## 2. Industrialisasi

Industrialisasi dalam pengertian lain adalah proses modernisasi ekonomi yang mencakup seluruh sektor ekonomi yang mempunyai kaitan satu sama lain dengan industri pengolahan. Artinya industrialisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi dengan sektor industri pengolahan sebagai *leading sector*, maksudnya adalah dengan adanya perkembangan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengalaman di sebagian besar negara, dapat disimpulkan bahwa industrialisasi adalah suatu keharusan karena menjamin kelangsungan

---

<sup>4</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 65

<sup>5</sup> Muhammad Teguh, *Ekonomi Industri* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), h. 7.

proses pembangunan ekonomi jangka panjang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan yang menghasilkan pendapatan perkapita setiap tahun.

### 3. Klasifikasi Industri

Industri manufaktur merupakan kegiatan ekonomi yang luas maka jumlah dan macam industri berbeda-beda untuk tiap negara atau daerah. Pada umumnya, makin maju tingkat perkembangan perindustrian di suatu negara atau daerah, makin banyak jumlah dan macam industri, dan makin kompleks pula sifat kegiatan dan usaha tersebut. Cara penggolongan atau pengklasifikasian industri pun berbeda-beda. Tetapi pada dasarnya, pengklasifikasian industri didasarkan pada kriteria yaitu berdasarkan bahan baku, tenaga kerja, pangsa pasar, modal, atau jenis teknologi yang digunakan.<sup>6</sup>

Selain faktor-faktor tersebut, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara juga turut menentukan keanekaragaman industri negara tersebut, semakin besar dan kompleks kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, maka semakin beranekaragam jenis industrinya. Secara garis besar ada sembilan jenis industri di bawah ini:<sup>7</sup>

- a. Industri makanan, minuman dan tembakau.
- b. Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit.
- c. Industri kayu dan barang dari kayu, termasuk perabot rumah tangga.
- d. Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan penerbitan.

---

<sup>6</sup> Alhiriani, *Pengaruh Investasi dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur di Sulawesi Selatan*, Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin (Skripsi, 2013), h. 6.

<sup>7</sup> Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1997), h. 20.

- e. Industri kimia dan barang dari kimia, minyak bumi, batu bara, karet dan plastik.
- f. Industri barang galian bukan logam, kecuali minyak bumi dan batu bara.
- g. Industri logam dasar.
- h. Industri barang dari logam, mesin dan peralatannya.
- i. Industri pengolahan lainnya.

Industri dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor industri, yaitu kelompok industri besar mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih, industri sedang memiliki tenaga kerja 20-99 orang, dan industri kecil memiliki tenaga kerja 5- 19 orang, dan industri rumah tangga memiliki tenaga kerja 1-4 orang. Klasifikasi industri menurut tenaga kerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1 Klasifikasi Industri menurut Banyaknya Tenaga Kerja**

No.	Klasifikasi Industri	Jumlah Tenaga Kerja (orang)
1.	Industri Besar	100 ke atas
2.	Industri Sedang	20 – 99
3.	Industri Kecil	5 – 19
4.	Industri Rumah Tangga	1 – 4

Sumber: Desperindag, 2009.

- a. Industri Besar dan Sedang

Pengelompokan sektor industri di Indonesia dibedakan menjadi dua. Pertama, pembagian sektor industri pengolahan berdasarkan jenis produk yang dihasilkan. Berdasarkan pengelompokan ini sektor industri pengolahan dibedakan menjadi Sembilan sub sektor.

Pengelompokan yang kedua adalah pembagian berdasarkan banyaknya tenaga kerja. Dengan pengelompokan ini sektor industri pengolahan dibedakan menjadi empat sub golongan, yaitu: industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang, dan industri besar. Berdasarkan pengelompokan ini, industri besar sedang menghasilkan nilai tambah terbesar.

#### b. Industri Kecil dan Rumah Tangga

Dalam rangka menunjang pembangunan di sektor industri, pemerintah tidak hanya memperhatikan pertumbuhan industri besar dan sedang saja, melainkan juga membantu berkembangnya industri kecil dan rumah tangga. Industri kecil dan rumah tangga memegang peranan penting dalam pembangunan, khususnya negara-negara yang sedang membangun, karena industri ini dapat membuka lapangan kerja yang luas, membuka kesempatan usaha dan memperluas basis pembangunan. Dalam berbagai bidang, industri kecil dan rumah tangga juga meningkatkan ekspor. Dalam pembentukan PDRB, peranan industri kecil dan rumah tangga sebenarnya tidaklah terlalu besar, bahkan dapat dikatakan sangat kecil. Akan tetapi peranan sektor ini dalam penyerapan tenaga kerja cukup besar.

### **B. Teori Tenaga Kerja**

Di dalam hukum perburuhan dan ketenagakerjaan terdapat beberapa istilah yang beragam seperti buruh, pekerja, karyawan, pegawai, tenaga kerja, dan lain-lain. Istilah buruh sejak dulu sudah populer dan kini masih sering dipakai sehingga sebutan untuk kelompok tenaga kerja yang sedang memperjuangkan program organisasinya. Istilah pekerja dalam praktek sering dipakai untuk menunjukkan status hubungan kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu

melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>8</sup>

Badan Pusat Statistik mendefinisikan bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (maksudnya seminggu sebelum pencacahan).

Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja (*working-age population*). Sedangkan menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.<sup>9</sup>

Tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praksis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur.<sup>10</sup>

Tenaga kerja adalah penduduk yang mempunyai umur didalam batas usia kerja. Tujuan dari pemilihan batas umur tersebut, supaya definisi yang diberikan sedapat mungkin menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Setiap negara

---

<sup>8</sup> Suroto, *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), h. 19.

<sup>9</sup> Subijanto, *Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan.

<sup>10</sup> Sendjun H Manululang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Citra, 1998),h.3



memilih batas umur yang berbeda karena situasi tenaga kerja pada masing-masing negara juga berbeda, sehingga batasan usia kerja antar negara menjadi tidak sama di Indonesia, batas umur minimal untuk tenaga kerja yaitu 15 tahun tanpa batas maksimal.<sup>11</sup>

Pemilihan umur 15 tahun sebagai batas umur minimal adalah berdasarkan kenyataan penduduk umur 15 tahun di Indonesia sudah bekerja atau mencari kerja terutama di desa-desa. Demikian juga Indonesia tidak menetapkan batasan umur maksimal tenaga kerja karena belum adanya jaminan sosial nasional. Hanya sebagian kecil penduduk yang menerima tunjangan hari tua, yaitu pegawai negeri dan sebagian pegawai swasta. Bagi golongan ini pun pendapatan yang diterima tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga mereka yang telah mencapai umur pensiun masih tetap bekerja untuk mencukupi kebutuhannya, sehingga mereka tetap digolongkan sebagai tenaga kerja.<sup>12</sup>

Jadi yang dimaksud dengan tenaga kerja yaitu individu yang sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha.

---

<sup>11</sup> Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1997), h. 20.

<sup>12</sup> Payman Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Jakarta: UI-Press, 1985), h. 98.

Dalam penyerapan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal tersebut antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pengangguran dan tingkat bunga. Dalam dunia usaha tidaklah memungkinkan mempengaruhi kondisi tersebut, maka hanyalah pemerintah yang dapat menangani dan mempengaruhi faktor eksternal. Sedangkan faktor internal dipengaruhi oleh tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, modal dan pengeluaran non upah.

### **C. Teori Investasi**

Investasi didefinisikan sebagai pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa yang akan datang. Dengan kata lain dalam teori ekonomi, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian. Secara umum investasi meliputi pertambahan barang dan jasa dalam masyarakat seperti pertambahan mesin-mesin baru, pembuatan jalan baru, lahan baru dan sebagainya. Investasi tidak hanya untuk memaksimalkan output tetapi untuk menentukan distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi. Sedangkan, Dombush & Fisher berpendapat bahwa investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan dimasa mendatang.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 65.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi adalah penanaman uang yang dilakukan di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pada dasarnya investasi adalah membeli suatu aset yang diharapkan dimasa yang akan datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi. Investasi juga pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan dapat memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang.<sup>14</sup>

Investasi adalah pengeluaran oleh sektor produsen (swasta) untuk pembelian barang dan jasa untuk menambah stok yang digunakan atau untuk perluasan pabrik.<sup>15</sup> Dan persyaratan umum pembangunan ekonomi suatu Negara adalah pertama, akumulasi modal. Dalam hal ini termasuk akumulasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia. kedua, perkembangan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan tenaga kerja dan keahliannya. Ketiga, kemajuan teknologi.

Akumulasi modal akan berhasil apabila beberapa bagian atau proporsi pendapatan yang ada ditabung dan diinvestasikan untuk memperbesar produk (output) dan pendapatan di kemudian hari. Untuk membangun itu seyogyanya mengalihkan sumber-sumber dari arus konsumsi dan kemudian mengalihkannya untuk investasi dalam bentuk “*capital formation*” untuk mencapai tingkat produksi yang lebih besar. Investasi dibidang pengembangan sumberdaya manusia

---

<sup>14</sup> Bodie, dkk, *Investments Investasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 3.

<sup>15</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonosia-Kampus FE UII, 2007), h.

akan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, sehingga menjadi tenaga ahli yang terampil yang dapat memperlancar kegiatan produktif.<sup>16</sup>

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat pendapatan nasional serta kesempatan kerja adapula pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi dan yang terakhir investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.<sup>17</sup>

Pada umumnya, investasi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Investasi pada aset-aset finansial (*financial assets*) yaitu investasi yang dilakukan di pasar uang misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, surat berharga pasar uang dan lain-lain.
  2. Investasi pada aset-aset riil (*real assets*) yaitu investasi yang dilakukan di pasar modal misalnya berupa saham dan lain-lain.
- Investasi pada aset-aset riil ini dapat berbentuk pembelian asset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan dan lainnya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* Trans Haris Munandar (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 93.

<sup>17</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 98.

<sup>18</sup> Abdul Halim, *Analisis Investasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2005), h. 4.

Dalam teori Neoklasik didasarkan pada pemikiran-pemikiran ekonomi klasik mengenai penentuan keseimbangan faktor-faktor produksi oleh perusahaan-perusahaan. Untuk memaksimumkan keuntungannya, setiap perusahaan akan menggunakan suatu faktor produksi hingga pada suatu tingkat dimana nilai produksinya sama dengan biaya yang dibelanjakan untuk memperoleh satu unit faktor produksi tersebut. Bila diaplikasikan pada tenaga kerja berarti nilai. Dan menurut Boediono di dalam teori makro Keynes keputusan apakah suatu Investasi akan di laksanakan atau tidak, tergantung pada perbandingan antara besarnya keuntungan yang di harapkan (yang menyatakan dalam persentase satuan waktu) di suatu pihak dan biaya penggunaan dana atau tingkat bunga di pihak lain.<sup>19</sup>

Teori *Big Push* menyatakan bahwa usaha harus dilaksanakan secara besar-besaran untuk mengatasi perubahan-perubahan penduduk. Implikasinya ialah harus diadakan investasi besar-besaran untuk menghilangkan kemiskinan, memaksimumkan output dengan menggunakan teknik yang paling produktif yang kadang-kadang membutuhkan kapital yang besar.

#### **D. Teori Upah**

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja

---

<sup>19</sup> Boediono. Ekonomi Moneter. Edisi ketiga, BPFE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1992, h. 44.

atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Undang-undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2000).<sup>20</sup>

Upah merupakan balas karya untuk faktor produksi tenaga kerja manusia (dalam arti luas, termasuk gaji, honorarium, uang lembur, tunjangan, dsb). Masih menurut Gilarso, upah biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu: upah nominal (sejumlah uang yang diterima) dan upah riil (jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan upah uang itu). Upah dalam arti sempit khusus dipakai untuk tenaga kerja yang bekerja pada orang lain dalam hubungan kerja (sebagai karyawan atau buruh).<sup>21</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan atau balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah tenaga kerja yang diberikan tergantung pada biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya, peraturan undang-undang yang mengikat tentang upah minimum regional (UMR), produktivitas marginal tenaga kerja, tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha, dan perbedaan jenis pekerjaan.

#### **E. Teori Belanja Pemerintah**

Dalam kebijakan fiskal dikenal ada beberapa kebijakan anggaran yaitu anggaran berimbang, anggaran surplus dan anggaran defisit. Dalam pengertian

---

<sup>20</sup> Alhiriani, *Pengaruh Investasi dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur di Sulawesi Selatan*, Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin (Skripsi, 2013), h. 30.

<sup>21</sup> Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), h. 45.



umum, anggaran berimbang yaitu suatu kondisi di mana penerimaan sama dengan pengeluaran ( $G = T$ ). Anggaran surplus yaitu pengeluaran lebih kecil dari penerimaan ( $G < T$ ). Sedangkan anggaran defisit yaitu anggaran pengeluaran lebih besar dari penerimaan ( $G > T$ ). Anggaran surplus digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah inflasi. Sedangkan anggaran defisit digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah pengangguran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah merencanakan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya.<sup>22</sup>

Belanja pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (pusat – propinsi – daerah). Pada masing-masing tingkatan dalam pemerintahan ini dapat mempunyai keputusan akhir – proses pembuatan yang berbeda dan hanya beberapa hal pemerintah yang di bawahnya dapat dipengaruhi oleh pemerintah yang lebih tinggi.

Argumentasi mengenai kebijakan publik dalam kaitan dengan kebijakan belanja pemerintah didasarkan pada situasi bahwa pasar tidak bisa berperan sendiri mengaktifkan mobilisasi aktivitas ekonomi terutama untuk mencapai efisiensi. Belanja pemerintah juga merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran

---

<sup>22</sup> Guripno Mangkoesobroto, *Ekonomi Publik* (Edisi Ketiga: Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2013), h. 169

yang bersangkutan.<sup>23</sup> Oleh karena itu, belanja pemerintah harus diolokasikan secara efektif untuk belanja daerah yang bersifat produktif.

Belanja pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa jenis belanja pemerintah yaitu:<sup>24</sup>

### **1. Belanja Tidak langsung**

Belanja tidak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan serta belanja tidak terduga. Belanja tidak langsung terdiri dari beberapa poin antara lain:

- a. Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada DPRD dan pegawai pemerintah daerah baik yang bertugas di dalam maupun di luar daerah.

---

<sup>23</sup> Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan Dalam Angka *In Figures*, 2015.

<sup>24</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 100.

- b. Belanja bunga adalah pembayaran bunga utang, pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.
- c. Belanja subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- d. Belanja hibah adalah belanja yang diperlukan untuk menganggarkan pemberian uang barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus.
- e. Belanja bantuan sosial adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **2. Belanja Langsung**

Belanja langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang daerah dan jasa serta belanja modal untuk melaksanakan program

dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

Ada beberapa pembangian belanja langsung antara lain:

- a. Belanja pegawai menampung seluruh pengeluaran negara yang digunakan untuk membayar gaji pegawai, termasuk berbagai tunjangan yang menjadi haknya, dan membayar honorarium, lembur, tunjangan khusus dan belanja pegawai, serta membayar pensiun dan asuransi kesehatan (kontribusi sosial). Dalam klasifikasi tersebut termasuk pula belanja gaji/upah proyek yang selama ini diklasifikasikan sebagai pengeluaran pembangunan. Dengan format ini, maka akan terlihat pos yang tumpang tindih antara belanja pegawai yang diklasifikasikan sebagai rutin dan pembangunan. Di sinilah nantinya efisiensi akan bisa diraih.
- b. Belanja barang yang seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan untuk pengadaan barang dan jasa, dan biaya pemeliharaan aset negara. Demikian juga sebaliknya sering diklasifikasikan sebagai pengeluaran pembangunan.
- c. Belanja modal menampung seluruh pengeluaran negara yang dialokasikan untuk pembelian barang-barang kebutuhan investasi (dalam bentuk aset tetap dan aset lainnya). Pos belanja modal dirinci atas (i) belanja modal aset tetap/fisik, dan (ii) belanja modal aset lainnya/non-fisik. Dalam prakteknya selama ini belanja lainnya nonfisik secara mayoritas terdiri dari belanja pegawai, bunga dan

perjalanan yang tidak terkait langsung dengan investasi untuk pembangunan.

Menurut Keynes, untuk menghindari timbulnya stagnasi dalam perekonomian, pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah pengeluaran pemerintah (G) dengan tingkat yang lebih tinggi dari pendapatan nasional sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan yang akan berdampak terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja. Dan dalam teori wagner juga menekankan pada perkembangan persentase pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap GNP. Menurutnya apabila dalam suatu perekonomian pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah akan ikut meningkat. Dan apabila belanja pemerintah mengalami peningkatan maka akan meningkatkan pula penyerapan tenaga kerja pada suatu sektor atau perusahaan.<sup>25</sup>

Belanja pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai. Melainkan harus diperhitungkan siapa yang akan terpekerjakan atau meningkat pendapatannya.

---

<sup>25</sup> Astri Winarti. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan, Dan Pdb Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Periode 1992-2012. Skripsi. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2014, h. 42.

Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak melemahkan kegiatan pihak swasta.<sup>26</sup>

#### **F. Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni: a) Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja. b) Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi. c) Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.<sup>27</sup>

Hubungan antara investasi (PMA dan PMDN) dengan kesempatan kerja menurut Harrod-Domar investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor produksi, otomatis akan ditingkatkan penggunaannya. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. Maka setiap negara berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi terutama investasi swasta yang dapat membantu membuka lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja.<sup>28</sup>

Keberhasilan pembangunan di suatu daerah disamping ditentukan oleh besarnya belanja pemerintah juga dipengaruhi oleh besarnya investasi di daerah.

---

<sup>26</sup> Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1997), h. 20.

<sup>27</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 65.

<sup>28</sup> Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 39.



Investasi merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Investasi dapat menjadi titik tolak bagi keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan di masa depan karena dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat yang pada gilirannya akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.<sup>29</sup>

Investasi merupakan salah satu faktor yang krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi jangka panjang. Pembangunan ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi di semua sektor ekonomi. Untuk keperluan tersebut maka dibangun pabrik-pabrik, perkantoran, alat-alat produksi dan infrastruktur yang dibiayai melalui investasi baik berasal dari pemerintah maupun swasta.<sup>30</sup>

Menurut teori yang dikemukakan oleh Harrod Domar, bahwa kenaikan tingkat output dan kesempatan kerja dapat dilakukan dengan adanya akumulasi modal (investasi) dan tabungan. Investasi meningkatkan output perekonomian dan dapat menghasilkan input. Oleh karena adanya investasi-investasi baru maka memungkinkan terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja baru yang akan menyerap tenaga kerja yang berkompeten dan berkualitas. Salah satu input yang mendorong salah satunya adalah tenaga kerja, tenaga kerja merupakan

---

<sup>29</sup> Sri Danawati1, dkk, Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. Jurnal. Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. h. 4.

<sup>30</sup> Sony Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), h. 43.

faktor pendorong penting dalam pertumbuhan perekonomian. Karena adanya investasi maka akan meningkatkan kesempatan kerja.<sup>31</sup>

### **G. Pengaruh Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Upah adalah imbalan yang diterima pekerja atas jasa yang diberikannya dalam proses memproduksi barang atau jasa di perusahaan. Dengan demikian pekerja dan pengusaha mempunyai kepentingan langsung mengenai sistem dan kondisi pengupahan di setiap perusahaan. Pekerja dan keluarganya sangat tergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, para pekerja selalu mengharapkan upah yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya. Di lain pihak, pengusaha melihat upah sebagai bagian dari biaya produksi, sehingga pengusaha biasanya sangat hati-hati untuk meningkatkan upah. Menurut Todaro, yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat upah yang ditawarkan kepada tenaga kerja hal ini akan menurunkan tingkat penyerapan tenaga kerja.<sup>32</sup>

Kenaikan tingkat upah mempengaruhi penyediaan tenaga kerja melalui dua daya yang saling berlawanan. Kenaikan tingkat upah di satu pihak meningkatkan pendapatan (*income effect*) yang cenderung untuk mengurangi tenaga kerja. Di pihak lain peningkatan upah membuat waktu senggang

---

<sup>31</sup> Gatot Setio Harijono, *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja Melalui Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2006-2010*, Jurnal (Bali: Universitas Udayana, 2012), h. 33.

<sup>32</sup> Sony Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), h. 43.

(*substitution effect*). Daya substitusi ini akan meningkatkan jumlah tenaga kerja tetapi setelah mencapai titik tertentu.<sup>33</sup>

Besar kecilnya upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Biaya produksi yang tinggi meningkatkan harga produk yang pada akhirnya membuat permintaan terhadap produk berkurang. Kondisi ini memaksa produsen untuk mengurangi jumlah produk yang dihasilkan, yang selanjutnya juga dapat mengurangi permintaan tenaga kerja. Penurunan jumlah tenaga kerja akibat perubahan skala produksi disebut efek skala produksi (*scale effect*). Suatu kenaikan upah dengan asumsi harga barang-barang modal yang lain tetap, maka pengusaha mempunyai kecenderungan untuk menggantikan tenaga kerja dengan mesin. Penurunan jumlah tenaga kerja akibat adanya penggantian dengan mesin disebut efek substitusi (*substitution effect*). Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat upah mempunyai hubungan yang negatif dengan penyerapan tenaga kerja.<sup>34</sup>

#### **H. Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Peranan pemerintah dalam suatu negara dapat dilihat dari semakin besarnya belanja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi telekomunikasi, transportasi, persediaan air yang merupakan kontribusi utama belanja pemerintah yang efisien untuk merangsang investasi sektor swasta. Hubungan pengeluaran pemerintah khususnya pengeluaran pembangunan dengan

---

<sup>33</sup> Reza Wicaksono, *Analisis Pengaruh PDB Sektor Industri, Upah Riil, Suku Bunga Riil dan Jumlah Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Pengolahan Sedang dan Besar di Indonesia Tahun 1990-2008*, Jurnal (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013), h. 5.

<sup>34</sup> Sony Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), h. 45

kesempatan kerja dalam hal ini dilihat dari sisi usaha meningkatkan investasi swasta berperan secara efektif. Terkait dengan itu, pengeluaran pemerintah khususnya pengeluaran pembangunan yang mendorong investasi swasta dapat menciptakan lapangan usaha yang nantinya dapat meningkatkan kesempatan kerja.<sup>35</sup>

Belanja pemerintah merupakan salah satu alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. belanja pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan. Kebijakan distribusi pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran dan ketepatan arah yang dapat menciptakan kesempatan kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi apabila distribusi belum dapat dilakukan secara merata maka ketimpangan pendapatan tetap akan terjadi dan cenderung meningkat. Dengan demikian analisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kesempatan kerja.<sup>36</sup>

Teori Keynes, menyatakan bahwa peranan atau campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan misalkan apabila perekonomian sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan sepenuhnya diatur oleh kegiatan sektor saja, maka perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan. Akan tetapi, fluktuasi kegiatan ekonomi yang lebar dari satu periode ke periode lainnya

---

<sup>35</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 75.

<sup>36</sup> Sri Danawati1, dkk, Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. Jurnal. Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. h. 5.

dan ini akan menimbulkan implikasi yang serius kepada kesempatan kerja, pengangguran dan tingkat harga.<sup>37</sup>

Belanja pemerintah merupakan suatu jenis kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah sebagai salah satu langkah untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Dalam teori Rostow dan Musgrave menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar.<sup>38</sup>

## I. Penelitian Terdahulu

Pratomo (2011), mengkaji tentang Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Karesidenan Surakarta Tahun 2000-2008. Dalam penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda dengan menggunakan *Eviews* versi 4. Berdasarkan hasil penelitiannya maka didapat hasil bahwa secara simultan investasi, belanja pemerintah dan ekspor berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja begitu pula secara parsial

---

<sup>37</sup>Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 75.

<sup>38</sup>Gatot Setio Harijono, *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja Melalui Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2006-2010*, Jurnal (Bali: Universitas Udayana, 2012), h. 32.

investasi, belanja pemerintah dan ekspor berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap penyerapan tenaga kerja.<sup>39</sup>

Luthfi Setiya Priambodo (2014) dengan judul penelitian Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Riil dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Semarang. Data yang digunakan adalah Data Pertumbuhan Ekonomi; Data PDRB riil tahun dasar 2000; Data Upah Riil; Data Pendapatan Per Kapita; Data IHK tahun dasar 2002; Data Investasi didapat dari publikasi BPS Kota Semarang mulai tahun 1993-2012 (*time series*). Analisis regresi yang digunakan adalah OLS dengan bantuan perangkat lunak Eviews 6.0 Portable. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel upah riil berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dengan  $\alpha$  5 %. Tetapi variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel investasi tidak berpengaruh signifikan secara statistik. Pada akhirnya peran variabel upah riil diharapkan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja guna tercapainya kondisi ketenagakerjaan daerah yang optimal.<sup>40</sup>

Nurafuah (2015), dengan judul Analisis Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Provinsi Jawa Tengah. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder sehingga metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data sekunder. metode analisis dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis kuantitatif serta regresi linier berganda. penyerapan tenaga kerja, sedangkan variabel independen yang

---

<sup>39</sup> Danang Pratomo, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Karesidenan Surakarta Tahun 2000-2008*, Skripsi (Surakarta: Universitas Sebelah Maret, 2011), h. 12.

<sup>40</sup> Luthfi Setiya Priambodo. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Riil dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Semarang*. Skripsi (Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2014). h. 7.



digunakan dalam penelitian ini adalah : Jumlah Usaha, Investasi, dan Upah Minimum Jawa Tengah. Kesimpulan yang diperoleh dengan pengujian korelasi Jumlah UKM mempunyai hubungan terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja, Investasi mempunyai hubungan terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja Sedangkan Upah minimum mempunyai hubungan terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja.<sup>41</sup>

Penelitian yang telah dilakukan oleh ke tiga peneliti telah memaparkan faktor-faktor yang apa saja yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Dalam penelitian ini penulis akan menggabungkan beberapa yang telah dilakukan sebelumnya yang akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana, pada penelitian ini akan diambil beberapa variabel yang telah diteliti kemudian menggabungkan menjadi satu penelitian yang berbeda dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi, perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan menggabungkan faktor investasi belanja pemerintah yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengambil dari periode 2009-2013.

## **J. Kerangka Pikir**

Pada gambar 2.1 dapat dilihat bahwa variabel investasi( $X_1$ ), UMR( $X_2$ ) dan belanja pemerintah( $X_3$ ) sedangkan Penyerapan Tenaga Kerja( $Y$ ) yang objek penelitiannya yaitu pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan.

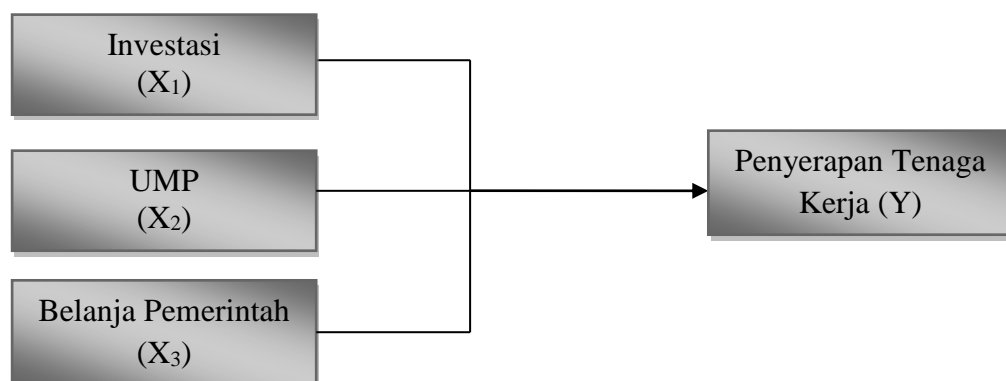
---

<sup>41</sup> Nurafuah Analisis Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah ( UKM ) di Provinsi Jawa Tengah (Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2015), h. 8.

Pada pembagian variabel di atas, apabila terjadi perubahan pada tingkat investasi, UMR dan belanja pemerintah, berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

Variabel investasi dianggap mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang diserap pada suatu sektor industri pengolahan karena investasi mempunyai peranan penting bagi setiap usaha karena bagaimanapun juga investasi akan menimbulkan peluang bagi pelaku ekonomi untuk memperluas usahanya serta memperbaiki sarana-sarana produksi, sehingga dapat meningkatkan output yang nantinya dapat memperluas kesempatan kerja. Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan variabel yang dianggap mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja, karena tingkat upah secara tidak langsung akan memberikan dampak terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja. Variabel belanja pemerintah menjadi salah satu variabel yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja karena belanja pemerintah sangat berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Jika belanja pemerintah dapat diefisienkan maka ini dapat memacu dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja. Dan Untuk lebih jelasnya pengaruh antara variabel X dan Y dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian



Kerangka pikir penelitian di atas menunjukkan variabel independen yaitu investasi, UMR dan belanja pemerintah, sedangkan variabel dependen yaitu penyerapan tenaga kerja. dapat dilihat dalam kerangka pikir digambarkan bahwa variabel investasi, UMR dan belanja pemerintah mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kemudian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan diantaranya yaitu investasi, UMR dan belanja pemerintah. Dari pengaruh faktor-faktor tersebut akan dilihat seberapa besar faktor-faktor tersebut mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **K. Hipotesis**

Hipotesis merupakan suatu proporsi yang mungkin benar dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau pemecahan ataupun untuk dasar penelitian lebih lanjut. Berdasarkan teori ekonomi dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan untuk diteliti adalah:

1. Diduga investasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2006-2015.
2. Diduga UMP berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2006-2015.

3. Diduga belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2006-2015.
4. Diduga investasi, UMR dan belanja pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2006-2015.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah *kuantitatif*, yaitu metode penelitian yang merupakan pendekatan ilmiah terhadap keputusan ekonomi. Pendekatan metode ini berangkat dari data lalu diproses menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan.<sup>1</sup>

Metode ini juga harus menggunakan alat bantu kuantitatif berupa *software computer* dalam mengelola data tersebut. Data kuantitatif ini berupa data runtut waktu (*time series*) yaitu data yang disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang di ambil adalah Provinsi Sulawesi Selatan, data yang diambil yaitu data yang berkaitan dengan variabel penelitian seperti data belanja pemerintah, investasi, UMP dan penyerapan tenaga kerja yang dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.

##### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Koordinasi Penanaman Modal Sulawesi Selatan dan sumber-sumber terkait dalam kurun waktu 2006-2015.

##### **C. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang dipakai dalam pengumpulan data adalah melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik untuk mendapatkan informasi melalui

---

<sup>1</sup>Mudrajad, Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan : Teori Masalah, dan Kebijakan*. (UPP AMP YKPN, 2000) hal.34.

catatan, literatur, dokumentasi dan lain-lain yang masih relevan dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang diperoleh adalah data dalam bentuk tahunan untuk masing-masing variabel.

#### **D. Metode Analisis Data**

Dalam analisis ini menggunakan metode teknik deskriptif yaitu analisis yang digunakan untuk mengungkapkan atau menggambarkan mengenai keadaan yang sesuai dengan fakta dan yang akurat dari tempat yang diteliti. Dan sesuai dengan teori yang berlaku serta diakui. Teknik ini juga digunakan untuk mencari solusi dari masalah yang terjadi terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja.

Dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja maka model analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = F(X_1, X_2, X_3) \dots \dots \dots (3.6)$$

$$Y = \beta_0 X_1 \beta_1 X_2 \beta_2 X_3 \beta_3 \epsilon \mu \dots \dots \dots (3.7)$$

Karena satuan setiap variabel majemuk maka harus dilogaritma naturalkan sehingga linear maka membentuk persamaan sebagai berikut:

$$\ln Y = \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_3 \mu \dots \dots \dots (3.8)$$

Dimana:

$Y$  = Penyerapan Tenaga Kerja (Jiwa)

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1$  = Koefisien Investasi



$\beta_2$  = Koefisien UMR

$\beta_3$  = Koefisien Belanja Pemerintah

$X_1$  = Investasi

$X_2$  = UMR

$X_3$  = Belanja Pemerintah

$\mu$  = *Error Term*

### 1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis *Ordinary Least Square* (OLS). Uji asumsi klasik terbagi menjadi empat yaitu:

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Salah satu metode untuk mengetahui normalitas adalah dengan menggunakan metode analisis grafik, baik dengan melihat grafik secara histogram ataupun dengan melihat secara *Normal Probability Plot*. Normalitas data dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik *Normal Probability Plot* atau dengan melihat histogram dari residualnya.

#### b. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model yang baik seharusnya tidak terjadinya korelasi yang tinggi diantara variabel bebas. *Tolerance* mengukur

variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai toleransi rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/tolerance$ ) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai cutoff yang umum dipakai adalah *tolerance* 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10.

#### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis grafik.

#### d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Salah satu metode analisis untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan pengujian nilai Durbin Watson (DW test).

### 2. Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah dalam penelitian, dimana rumusan masalah dalam penelitian yang ada di bab 1 telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dalam penelitian ini menggunakan hipotesis *asosiatif* untuk melihat pengaruh dari variabel investasi, UMR dan belanja pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri

pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan. Uji hipotesis terbagi menjadi tiga yaitu:

a. Uji Simultan (Uji F)

Uji F ini biasa digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara signifikan terhadap variabel dependen. Dimana jika nilai signifikan  $< 0,05$  atau variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, artinya perubahan yang terjadi pada variabel terikat dapat dijelaskan oleh perubahan variabel bebas, dimana tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,5%.

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel independen (investasi, UMR dan belanja pemerintah) terhadap variabel dependen (penyerapan tenaga kerja) dan bahwa menganggap variabel dependen yang lain konstan. Signifikansi tersebut dapat diestimasi dengan melihat nilai signifikan, apabila nilai signifikan  $< 0,05$  maka variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen, sebaliknya jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka dapat dikatakan bahwa variabel independen secara parsial tidak mempengaruhi variabel dependen.

c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi merupakan besaran yang menunjukkan besarnya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Dengan kata lain, koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya.

### E. Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen (Y) dan tiga variabel independen (X). Adapun definisi operasional masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

- a. Penyerapan Tenaga Kerja (Y) adalah jumlah tenaga kerja yang diserap pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2006-2015 yang dinyatakan dalam jiwa.
- b. Investasi ( $X_1$ ) adalah sejumlah dana yang diinvestasikan (PMA dan PMDM) pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2006-2015 yang dinyatakan dalam rupiah (Rp).
- c. UMR ( $X_2$ ) adalah upah minimum provinsi yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang berlaku di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2006-2015 yang dinyatakan dalam rupiah (Rp).
- d. Belanja Pemerintah ( $X_3$ ) adalah belanja pemerintah daerah berupa belanja modal dalam rangka penyelenggaraan sektor industri pengolahan dalam menyerap tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2006-2015 yang dinyatakan dalam rupiah (Rp).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan**

##### **1. Kondisi Geografis**

Sulawesi Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Jazira selatan pulau Sulawesi. Ibu kotanya adalah Makassar, dahulu disebut Ujung Pandang. Provinsi Sulawesi Selatan terletak  $0^{\circ}12'$  –  $8^{\circ}$  Lintang Selatan dan  $116^{\circ}48'$  –  $122^{\circ}36'$  Bujur Timur. Luas wilayahnya  $62.482,54 \text{ km}^2$  (42% dari luas seluruh Pulau Sulawesi dan 4,1% dari luas seluruh Indonesia). Provinsi ini memiliki posisi yang strategis di kawasan timur Indonesia yang memungkinkan Provinsi ini sebagai pusat pelayanan, baik bagi kawasan timur Indonesia maupun skala Internasional. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar
- c. Sebelah timur berbatasan dengan teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan laut Flores.

Hampir 75 persen wilayah Sulawesi Selatan merupakan daerah daratan tinggi yang memajang ditengah daratan dari utara ke selatan melalui Gunung Rante Mario dan Gunung Ganda Dewata di Kabupaten Luwu dan Luwu Utara, di wilayah bagian utara hingga Gunung Lompobattang di Kabupaten Bantaeng

daratan rendah/ pantai membentang sepanjang pesisir pantai barat, tengah dan timur dengan total panjang pantai yang dimiliki kurang lebih 2500 km.

Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 46.083,94 Km<sup>2</sup>. Secara administrasi, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 24 kabupaten/kota yang terdiri dari 21 kabupaten 3 kota. Dari 24 Kabupaten/Kota tersebut, didalamnya terdapat 305 wilayah kecamatan, 2.243 desa dan 771 kelurahan definitif pada tahun 2014.

## **2. Kondisi Demografi**

Penduduk Sulawesi Selatan berdasarkan DAU Tahun 2014 berjumlah 8.432.163 jiwa yang tersebar di 24 kabupaten/kota, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 1.429.242 mendiami Kota Makassar. Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari penduduk yang berjenis kelamin laki-laki, hal ini tercermin dari angka rasio jenis kelamin yang lebih kecil dari 100. Hanya di daerah Kabupaten Enrekang, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Toraja Utara yang menunjukkan angka rasio jenis kelamin lebih besar dari 100.

## **3. Kondisi Ketenagakerjaan**

Penduduk usia kerja di daerah Sulawesi Selatan pada tahun 2011 berjumlah 5.575.602 jiwa. Dari seluruh penduduk usia kerja, yang masuk menjadi angkatan kerja berjumlah 3.612.424 jiwa atau lebih dari 50% dari seluruh penduduk usia kerja. Dari seluruh angkatan kerja tercatat bahwa 236.926 jiwa dalam status mencari pekerjaan. Dari angka tersebut dapat dihitung tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2011 yakni sebesar 6,56 %.



#### 4. Kondisi Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009 sebesar 6,23%. Namun demikian, pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi mampu mencapai 8,19% dan pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi telah tumbuh mencapai 7,62%. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2011 tersebut telah melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mencapai 6,46%.

#### 5. Aspek Ekonomi Makro

Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan tumbuh 5,23% lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 7,71%. Melambatnya perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan disebabkan oleh menurunnya kinerja di dua sektor ekonomi utama yaitu sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Dari sisi kelompok pengeluaran, penurunan kinerja ekspor menjadi penyebab utama melambatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara itu, tekanan inflasi tercatat menurun sebesar 7,13%.

Penurunan tekanan inflasi pada beberapa kelompok barang/jasa seperti penurunan harga BBM bersubsidi, masuknya musim panen pada beberapa komoditas diperkirakan menjadi faktor pendorong penurunan tekanan inflasi. Selain itu, faktor cuaca yang membaik mempengaruhi pasokan komoditas dan distribusi barang lebih lancar. Kondisi sistem keuangan yang diwakili oleh indikator perbankan tetap menunjukkan penguatan dan tetap dalam resiko yang terjaga. Di sisi lain, sistem pembayaran menunjukkan perlambatan. Beberapa indikator sistem pembayaran tunai dan non tunai menunjukkan *trend* penurunan di

awal tahun. Perekonomian ke depan masih memiliki tantangan-tantangan antara lain dalam hal peningkatan produktivitas untuk mendorong investasi dan produksi industri berbasis sektor primer. Dari stabilitas harga dan ketahanan pangan, peningkatan produksi tanaman pangan beserta infrastruktur pendukung (waduk, irigasi), serta kerjasama antar TPID untuk mengatasi gejolak harga karena ketimpangan pasokan dan permintaan kiranya perlu diperkuat. Pola kebijakan seperti penentuan tarif batas atas angkutan dan penetapan harga eceran tertinggi untuk LPG sudah mulai diintrodusir oleh Pemerintah Daerah.

## **B. Deskripsi Perkembangan Variabel**

Gambaran tentang perkembangan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu variabel penyerapan tenaga kerja sebagai variabel dependent sedangkan investasi, upah dan belanja pemerintah sebagai variabel independent.

1. Perkembangan Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan

**Tabel 4.1**  
**Jumlah tenaga kerja pada sektor industri pengolahan**  
**di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2006–2015**

<b>Tahun</b>	<b>Penyerapan Tenaga Kerja (Jiwa)</b>	<b>Persentase Pertumbuhan (%)</b>
2006	41.187	-
2007	46.069	11.86
2008	40.775	-11.50
2009	46.069	12.98
2010	43.347	-5.90
2011	35.692	-17.66
2012	54.608	52.99
2013	56.436	3.35
2014	57.540	1.95
2015	64.191	11.55

*Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, tahun 2016.*

Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 penyerapan tenaga kerja sebesar 46.069 atau sebesar 12.98% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2011 yaitu menjadi 35.692 atau mengalami penurunan sebesar -17.66%. Kepala BKPM Mahendra Siregar mengatakan penyerapan tenaga kerja yang rendah pada tahun ini, padahal pada tahun sebelumnya terlihat tren kenaikan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat persektor investasi yang masuk lebih mengarah penggunaan padat modal dibandingkan ke padat karya sehingga menyebabkan terjadinya pergantian fungsi produksi yaitu penggunaan tenaga kerja manusia beralih ke teknologi atau mesin, dimana penguasaan teknologi dan penggunaan mesin-mesin yang lebih modern akan menyebabkan penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan. Akan tetapi, pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 54.608 atau mengalami kenaikan sebesar 52.99%. Naik turunnya jumlah penyerapan tenaga kerja atau terjadinya fluktuasi juga sangat dipengaruhi oleh keadaan perekonomian secara umum karena dengan perekonomian yang maju maka pendapatan masyarakat ikut meningkat sehingga permintaan atau pola konsumsi masyarakat juga ikut meningkat yang nantinya terjadi perluasan lapangan kerja yang baru yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan dapat membantu meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja dan sebaliknya apabila pendapatan masyarakat menurun maka akan berpengaruh pada tingkat permintaan dan pola konsumsi masyarakat sehingga pihak perusahaan akan mengurangi produksi yang dihasilkan yang nantinya menungkan pula jumlah permintaan tenaga kerja.

## 2. Perkembangan Investasi di Provinsi Sulawesi Selatan

**Tabel 4.2**  
**Jumlah investasi pada sektor industri pengolahan di**  
**Provinsi Sulawesi Selatan periode 2006–2015**

Tahun	Investasi (Rp)	Persentase Pertumbuhan (%)
2006	1.896.616.313	-
2007	3.841.937.157	102.56
2008	4.842.996.003	26.05
2009	5.986.722.123	23.61
2010	3.213.409.048	-46.32
2011	4.222.936.000	50.71
2012	5.884.130.000	21.50
2013	8.579.410.000	45.80
2014	9.884.510.000	15.21
2015	11.604.481.781	17.40

*Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, tahun 2016.*

Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa investasi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2007 investasi sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 3.841.937.157 atau sebesar 102.56% dan mengalami peningkatan sampai pada tahun 2009 menjadi sebesar 5.986.722.123 atau mengalami kenaikan sebesar 23.61%, kemudian pada tahun 2010 terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu menjadi 3.213.409.048 atau mengalami penurunan sebesar -46.32%. Hal ini disebabkan oleh tingkat inflasi yang terjadi. Akan tetapi pada tahun 2012 mengalami penyimpangan dimana investasi mengalami peningkatan sebesar 5.884.130.000 atau mengalami kenaikan sebesar 21.50% tetapi justru penyerapan tenaga kerja pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 54.608 (jiwa) atau sebanyak 52.99 %. Dalam detikFinance, dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Apabila dirinci sesuai dengan Penerimaan Modal yang semakin meningkat namun penyerapan tenaga kerja

menurun. Hal ini disebabkan karena investasi yang masuk diindustri pengolahan lebih mengarah pada padat modal dibandingkan penggunaan pada padat karya sehingga menurunkan jumlah penyerapan tenaga kerja dan pada tahun 2013 sampai 2015 terus mengalami peningkatan hal ini disebabkan oleh tingginya partisipasi atau dukungan pemerintah dalam hal menyediakan sarana dan prasarana yang akan mendukung perkembangan perekonomian serta mengairahkan atau menarik investasi yang dilakukan para investor.

### 3. Perkembangan UMR di Provinsi Sulawesi Selatan

**Tabel 4.3**  
**Jumlah UMR pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan**  
**periode 2006–2015**

Tahun	Upah Minimum Regional (Rp)	Persentase Kenaikan (%)
2006	510.000	-
2007	612.000	20
2008	679.000	10.95
2009	950.000	39.91
2010	1.000.000	5.26
2011	1.100.000	10
2012	1.200.000	9.09
2013	1.440.000	20
2014	1.800.000	25
2015	2.000.000	11.11

*Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, tahun 2016.*

Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa jumlah UMR dari setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dapat dilihat bahwa UMR yang paling tinggi adalah pada tahun 2015 yaitu sebesar 2.000.000 atau sebesar 11.11%. Hal ini disebabkan oleh tingkat harga kebutuhan di pasar yang setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga disesuaikan dengan biaya hidup karyawan. Selain itu juga dilihat dari tingkat pendapatan daerah dan iklim

investasi setiap daerah. Secara umum, kondisi UMR di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan semakin tingginya harga berbagai macam kebutuhan hidup masyarakat.

#### 4. Perkembangan Belanja Pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan

**Tabel 4.4**  
**Jumlah belanja pemerintah pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2006–2015**

Tahun	Belanja Pemerintah (Rp)	Persentase Kenaikan (%)
2006	307.138.061	-
2007	4.040.875.168	12.156
2008	4.288.562.753	6.13
2009	3.699.444.799	-13.73
2010	4.288.562.753	15.93
2011	3.699.444.799	-13.73
2012	4.151.911.913	12.24
2013	6.213.947.459	49.66
2014	10.584.611.566	70.33
2015	12.118.469.111	14.49

*Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, tahun 2016.*

Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa belanja pemerintah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2007 belanja pemerintah sebesar 4.040.875.168 atau sebesar 12.156% dan pada tahun 2008 belanja pemerintah mengalami peningkatan menjadi 4.288.562.753 atau mengalami kenaikan sebesar 6.13%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2009 sebesar 3.699.444.799 atau mengalami penurunan sebesar -13.73%. Hal ini disebabkan karena selama ini belanja pemerintah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Seharusnya, alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik.



## C. Hasil Penelitian

### 1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik (*classical assumptions*) adalah uji statistik untuk mengukur sejauhmana sebuah model regresi dapat disebut sebagai model yang baik. Model regresi disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi-asumsi klasik yaitu normalitas data, multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Proses pengujian asumsi klasik menggunakan SPSS dilakukan bersamaan dengan proses uji regresi sehingga langkah-langkah menggunakan langkah kerja yang sama dengan uji regresi. Uji asumsi klasik terbagi beberapa uji, yaitu uji normalitas data dengan memperhatikan grafik hisotogram dan grafik uji normalitas, uji multikoleneartitas data dengan memperhatikan nilai tolerance dan nilai VIF, uji heteroskedastisitas dengan memperhatikan hasil regresi scatterplot dan uji autokorelasi dengan memperhatikan nilai durbin watson.

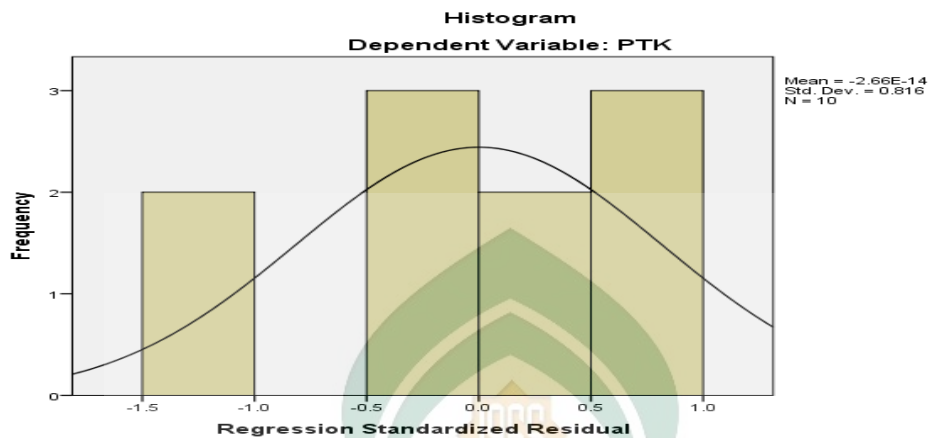
Adapun pengujiannya dapat dibagi dalam beberapa tahap pengujian, yaitu:

#### a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable terikat dan variable bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui hasil regresi terjadi gejala normalitas data dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik normal P-Plot atau dengan melihat histogram dari residualnya. Uji normalitas dengan grafik *Normal*

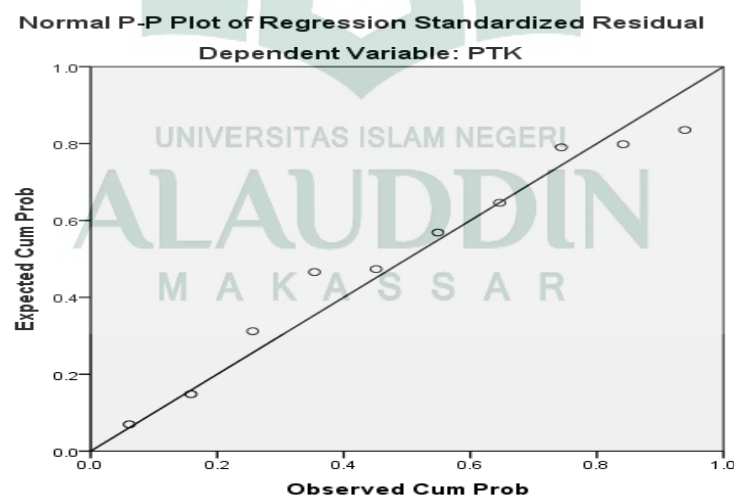
*P-Plot* akan membentuk satu garis lurus diagonal, kemudian *plotting* data akan dibandingkan dengan garis diagonal

**Gambar 4.1 Grafik Histogram**



Sumber: SPSS 21 data diolah, Tahun 2017

**Gambar 4.2 Grafik Uji Normalitas**



Sumber: SPSS 21 data diolah, Tahun 2017

Dari gambar 4.1 terlihat bahwa pola distribusi mendekati normal, karena data mengikuti arah garis grafik histogramnya. Dari gambar 4.2 Sebagaimana terlihat dalam grafik *Normal P-P plot of regression Standardized Residual*, terlihat

bahwa titik–titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal (membentuk garis lurus), maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal dan model regresi layak dipakai untuk memprediksi jumlah pengangguran berdasarkan variabel bebasnya.

#### **b. Uji Multikolinearitas**

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variable independent. Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara yang tinggi diantara variable bebas. Tolerance mengukur variabilitas variable bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variable bebas lainnya. Jadi nilai toleransi rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai cutoff yang umum dipakai adalah tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10.

Berdasarkan aturan variance inflation factor (VIF) dan tolerance, maka apabila VIF melebihi angka 10 atau tolerance kurang dari 0,10 maka dinyatakan terjadi gejala multikolinieritas. Sebaliknya apabila nilai VIF kurang dari 10 atau tolerance lebih dari 0,10 maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Tabel 4.5  
Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Investasi (X1)	.161	6.223
Upah Minimum Regional (X2)	.173	5.790
Belanja Pemerintah (X3)	.135	7.414

Sumber: SPSS 21 data diolah, Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, maka dapat diketahui nilai VIF untuk masing-masing variable penelitian sebagai berikut :

- Nilai VIF untuk variable investasi sebesar  $6.223 < 10$  dan nilai toleransi sebesar  $0.161 > 0.10$  sehingga variabel investasi dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.
- Nilai VIF untuk variabel upah minimum regional sebesar  $5.790 < 10$  dan nilai toleransi dan sebesar  $0.173 > 0.10$  sehingga variabel upah minimum regional dinyatakan tidak terjadi multikolonieritas.
- Nilai VIF untuk variabel belanja pemerintah sebesar  $7.414 < 10$  dan nilai toleransi sdasebesar  $0.135 > 0.10$  sehingga variabel belanja pemerintah dinyatakan tidak terjadi multikolonieritas.

#### c. Uji Heteroskedastisitas

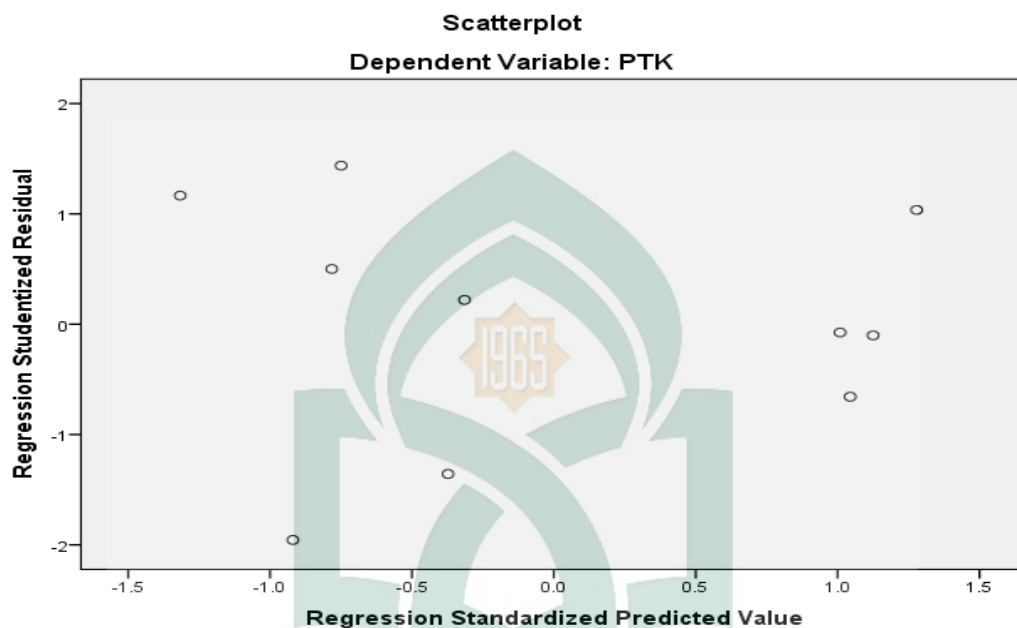
Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas, dan jika varians berbeda, disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi Heteroskedastisitas. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas.

2. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil pengujian ditunjukkan dalam gambar berikut :

**Gambar 4.3 Grafik Scatterplot**



Sumber: SPSS 21 data diolah, Tahun 2017

Dari grafik Scatterplot tersebut, terlihat titik –titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heretoskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi jumlah penyerapan tenaga kerja berdasar masukan variabel independent-nya.

#### **d. Uji Autokorelasi**

Salah satu metode analisis untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dengan melakukan pengujian nilai Durbin Watson (DW test). Jika nilai DW lebih

besar batas atas (du) dan kurang dari jumlah variabel independen, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6  
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.915 <sup>a</sup>	.836	.755	.09211	1.961

Sumber: SPSS 21 data diolah, Tahun 2017

Pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson menunjukkan nilai 1.961 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien bebas dari gangguan autokorelasi.

## 2. Analisis Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel hasil uji *coefisient* berdasarkan output SPSS versi 21 terhadap variabel-variabel yaitu investasi (X<sub>1</sub>), UMR (X<sub>2</sub>) dan belanja pemerintah (X<sub>3</sub>) terhadap penyerapan tenaga kerja (Y) sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan ditunjukkan pada tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7  
Rekapitulasi Hasil Uji Regresi

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11.006	2.577		4.271	.005
Investasi (X1)	.013	.139	.038	.092	.930
Upah Minimum Regional (X2)	-.166	.163	-.404	-1.016	.349
Belanja Pemerintah (X3)	.074	.027	1.225	2.726	.034

Sumber: SPSS 21 data diolah, Tahun 2017



Berdasarkan pada hasil koefisien regresi ( $\beta$ ) di atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Ln}Y = \text{Ln}\beta_0 + \beta_1 \text{Ln}X_1 - \beta_2 \text{Ln}X_2 + \beta_3 \text{Ln}X_3 + \mu$$

$$Y = 11.006 + 0.013 X_1 - 0.166 X_2 + 0.074 X_3 + 0.92$$

Hasil dari persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

**a. Investasi ( $X_1$ )**

Nilai konstanta regresi investasi 0.013 menyatakan bahwa setiap peningkatan 1% investasi maka akan menyebabkan peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0.013%. Dan sebaliknya jika investasi menurun 1% maka akan menyebabkan penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0.013%. Arah hubungan antara investasi dengan jumlah penyerapan tenaga kerja adalah searah (+), dimana kenaikan atau penurunan investasi akan mengakibatkan kenaikan dan penurunan jumlah pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan.

**b. Upah Minimum Regional ( $X_2$ )**

Nilai konstanta regresi UMR 0.166 menyatakan bahwa setiap peningkatan 1% UMR maka akan menyebabkan penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0.166%. Dan sebaliknya jika UMR berkurang 1% maka akan menyebabkan peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0.166%. Arah hubungan antara UMR dengan jumlah penyerapan tenaga kerja adalah negatif (-), dimana kenaikan atau penurunan UMR akan mengakibatkan penurunan atau kenaikan jumlah penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan.

### c. Belanja Pemerintah ( $X_3$ )

Nilai konstanta regresi belanja pemerintah 0.074 menyatakan bahwa setiap peningkatan 1% belanja pemerintah maka akan menyebabkan peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0.074%. Dan sebaliknya jika penyerapan tenaga kerja berkurang 1% maka akan menyebabkan penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0.074%. Arah hubungan antara belanja pemerintah dengan jumlah penyerapan tenaga kerja adalah positif (+).

### 3. Uji Hipotesis

Selanjutnya dari persamaan regresi berganda dilakukan uji hipotesis dengan prosedur pengujiannya sebagai berikut :

#### a. Uji F

Uji F merupakan pengujian pengaruh secara simultan dari variabel investasi ( $X_1$ ), UMR ( $X_2$ ) dan belanja pemerintah ( $X_3$ ) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja ( $Y$ ). Dari hasil analisis diperoleh hasil output pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8  
Hasil Uji F

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum Of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.260	3	.087	10.226	.009 <sup>b</sup>
Residual	.051	6	.008		
Total	.311	9			

Sumber: SPSS 21 data diolah, Tahun 2017

Dari hasil regresi yang ditunjukkan pada tabel 4.8, pengaruh variabel investasi ( $X_1$ ), UMR ( $X_2$ ) dan belanja pemerintah ( $X_3$ ) berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja ( $Y$ ) pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan nilai signifikan sebesar 0.009<sup>b</sup> yang lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa investasi ( $X_1$ ), UMR ( $X_2$ ) dan belanja pemerintah ( $X_3$ ) berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja ( $Y$ ) pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2006-2015.

b. Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dari hasil analisis diperoleh hasil output pada tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9  
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11.006	2.577		4.271	.005
Investasi ( $X_1$ )	.013	.139	.038	.092	.930
Upah Minimum Regional ( $X_2$ )	-.166	.163	-.404	-1.016	.349
Belanja Pemerintah ( $X_3$ )	.074	.027	1.225	2.726	.034

Sumber: SPSS 21 data diolah, Tahun 2017

Pada tabel 4.9 perhitungan uji t dapat dilihat hasil pengujiannya terhadap masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya dapat dianalisis sebagai berikut :

Variabel investasi, nilai  $t$  probabilitas (0.930) lebih besar dari taraf nyata sebesar 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja. Nilai  $t$  positif menunjukkan bahwa investasi mempunyai hubungan yang searah dengan jumlah penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Variabel UMR, nilai  $t$  probabilitas (0.349) lebih besar dari taraf nyata sebesar 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel UMR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pengangguran. Nilai  $t$  negatif menunjukkan bahwa UMR mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan jumlah penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Variabel belanja pemerintah, nilai  $t$  probabilitas (0.034) lebih kecil dari taraf nyata sebesar 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel belanja pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja. Nilai  $t$  positif menunjukkan bahwa belanja pemerintah mempunyai hubungan yang searah dengan jumlah penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan.

### c. R-Square ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Nilai

yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Untuk melihat nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ), dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10  
Koefisien determinasi ( $R^2$ )

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.915 <sup>a</sup>	.836	.755	.09211	1.961

Sumber: SPSS 21 data diolah, Tahun 2017

Dari hasil regresi pengaruh variabel investasi, UMR dan belanja pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industry pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0.836.

Hal ini berarti variasi variabel independen (bebas) menjelaskan variasi penyerapan tenaga kerja pada sektor pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 83.6%. Adapun sisanya variasi variabel lain dijelaskan diluar model sebesar 16.4%.

#### **D. Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **1. Pengaruh Investasi ( $X_1$ ) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja ( $Y$ )**

Variabel investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dengan arah yang positif. Nilai signifikan dapat dilihat pada tabel 4.9 yang menunjukkan nilai signifikan untuk variabel investasi yaitu  $0.930 > 0.05$  sehingga dapat dikatakan variabel invetasi tidak berpengaruh signifikan terhadap

penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Nilai koefisien regresinya yaitu sebesar 0.013 menunjukkan bahwa setiap penambahan investasi 1% maka akan meningkatkan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 0.013%. Dengan melihat hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara investasi terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan yang positif meskipun tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini disebabkan investasi yang masuk ke Provinsi Sulawesi Selatan lebih condong ke sektor-sektor yang bermuatan padat modal, sehingga tidak berdampak kuat terhadap kesempatan kerja yang ada. Hal lain yang menyebabkan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja yaitu karena adanya disebabkan adanya indikasi terjadi teori dependensi di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu investasi yang masuk ke Provinsi Sulawesi Selatan dapat meningkatkan pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan namun tidak dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakatnya, sehingga terjadi peningkatan kesenjangan pendapatan.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja tidak signifikan meskipun berhubungan positif. Hal ini disebabkan ada indikasi bahwa investasi yang masuk lebih ke padat modal dibanding padat karya. Sehingga yang harus dilakukan pemerintah yaitu pemerintah harus lebih selektif dalam pemberian izin investasi padat modal namun memberi kemudahan izin pada investasi padat karya sehingga investasi akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Setelah melihat kondisi tenaga

kerja di Provinsi Sulawesi Selatan pemerintah harus lebih memberi perhatian terhadap kebijakan di bidang investasi sehingga mengarahkan investor terhadap sektor-sektor yang lebih menyerap tenaga kerja.<sup>1</sup>

Penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Harrod-Domar (1998) yang menyatakan bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan tenaga kerja tetapi juga dapat memperbesar kapasitas produksi. Karena dengan adanya investasi maka ini dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja karena investasi yang banyak akan mampu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja dan didukung oleh teori Baran (1989), yang menyatakan bahwa investasi yang masuk ke suatu Negara lebih berorientasi pada padat modal dibandingkan dengan padat karya, sehingga menyebabkan penyerapan tenaga kerja dalam suatu Negara mengalami penurunan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yani (2011), dalam analisisnya mengenai pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2000-2009 dengan menggunakan model regresi linier berganda. Berdasarkan hasil regresi, investasi berpengaruh tidak signifikan namun positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Ini terjadi karena kebanyakan industri merupakan industri padat modal bukannya padat karya. Selain itu investasi khususnya bersumber dari pemerintah lebih berorientasi pada pembangunan sektor-sektor yang kurang menyerap tenaga kerja.<sup>2</sup> Akan tetapi, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Umar (2013),

---

<sup>1</sup> Gatot Setio Harijono, *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja Melalui Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2006-2010*, Jurnal (Bali: Universitas Udayana, 2012), h. 356.

<sup>2</sup> Ahmad Yani, *Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sulawesi Selatan Periode 2000-2009*, Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin (Skripsi, 2011), h. 45.



dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel investasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja hal ini disebabkan karena tingginya investasi membuat perusahaan menambah tenaga kerjanya sehingga memperoleh output yang lebih tinggi.<sup>3</sup>

## **2. Pengaruh UMR (X<sub>2</sub>) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Y)**

Variabel UMR tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dengan arah yang negatif. Nilai signifikan dapat dilihat pada tabel 4.9 yang menunjukkan nilai signifikan untuk variabel investasi yaitu  $0.394 > 0.05$  sehingga dapat dikatakan variabel UMR tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Nilai koefisien regresinya yaitu sebesar  $-0.166$  menunjukkan bahwa setiap penambahan investasi 1% maka akan menurunkan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar  $-0.166\%$ . Dengan melihat hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara UMR terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan yang negative meskipun tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan UMR perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit barang yang diproduksi.

Hal ini senada dengan teori klasik yang menyatakan bahwa UMR memiliki hubungan yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja yaitu semakin

---

<sup>3</sup> Azis Umar, *Pengaruh Investasi dan Upah Minimum Provinsi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri di Provinsi Sulawesi Selatan*, Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri (Skripsi, 2013), h. 62.

tinggi UMR maka semakin rendah penyerapan tenaga kerja. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Todaro (2000) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat upah yang ditawarkan kepada tenaga kerja hal ini akan menurunkan tingkat penyerapan tenaga kerja. Pendapat ini pula didukung oleh Sumarsono (2003) bahwa besar kecilnya upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Biaya produksi yang tinggi akan meningkatkan harga produk yang pada akhirnya membuat permintaan terhadap barang berkurang.<sup>4</sup>

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi (2013), yang menyatakan bahwa variabel UMP berpengaruh tidak signifikan dan berhubungan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja dengan tingkat signifikan ( $0,057 > 0,05$ ).<sup>5</sup> Akan tetapi, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2013), dimana dalam penelitiannya variabel UMP merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.<sup>6</sup>

### **3. Pengaruh Belanja Pemerintah (X<sub>2</sub>) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Y)**

Variabel belanja pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dengan arah yang positif. Nilai signifikan dapat dilihat pada tabel 4.9 yang menunjukkan nilai signifikan untuk variabel belanja pemerintah yaitu  $0.034 < 0.05$  sehingga dapat dikatakan variabel belanja pemerintah berpengaruh

---

<sup>4</sup> Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* Trans Haris Munandar (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 91.

<sup>5</sup> Luh Diah Citra Resmi Cahyadi, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Industri di Kota Denpasar*, Denpasar: Program Pasca Sarjana. Universitas Udayana Denpasar (Tesis, 2013), h. 62.

<sup>6</sup> Reza Wicaksono, *Analisis Pengaruh PDB Sektor Industri, Upah Riil, Suku Bunga Riil dan Jumlah Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Pengolahan Sedang dan Besar di Indonesia Tahun 1990-2008*, Jurnal (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013), h. 16.

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Nilai koefisien regresinya yaitu sebesar 0.074 menunjukkan bahwa setiap penambahan belanja pemerintah 1% maka akan meningkatkan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 0.074%. Dengan melihat hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara belanja pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah dapat memperbesar output yang dihasilkan oleh suatu sektor ekonomi. Selain itu juga dapat menaikkan pendapatan masyarakat karena belanja pemerintah akan menjadi sumber penerimaan masyarakat sehingga mendorong permintaan agregat.

Penelitian ini didukung oleh teori Keynes (1990) yang menyatakan bahwa dalam pengalokasian belanja pemerintah membutuhkan adanya campur tangan dari pemerintah suatu daerah karena apabila pengalokasian belanja pemerintah hanya dikendalikan oleh sektor industri saja maka tidak selamanya akan mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan dan ini sudah mulai diaplikasikan di Provinsi Sulawesi Selatan secara bertahap. Dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratomo (2011), dimana dalam penelitiannya belanja pemerintah berpengaruh signifikan terhadap

penyerapan tenaga kerja.<sup>7</sup> Akan tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harijono (2011), yang menyatakan bahwa belanja pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja karena adanya kesalahan penetapan strategi pengalokasian dan pendistribusian belanja pemerintah.<sup>8</sup>



---

<sup>7</sup> Danang Pratomo, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Karesidenan Surakarta Tahun 2000-2008*, Skripsi (Surakarta: Universitas Sebelah Maret, 2011), h. 74.

<sup>8</sup> Gatot Setio Harijono, *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja Melalui Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2006-2010*, Universitas Udayana Bali (Jurnal, 2012), h. 363.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Investasi tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2006-2015.
2. UMR tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2006-2015.
3. Belanja pemerintah berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2006-2015.
4. Investasi, UMR dan belanja pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2006-2015.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1. Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan hendaknya dapat melihat pengalokasikan dana investasi dengan baik, apakah dana investasi lebih kearah padat karya atau kepadat modal.
2. Pemerintah daerah hendaknya lebih memperhatikan tingkat UMR yang berlaku di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga dapat disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat, sehingga masalah kekurangan biaya hidup para pekerja dapat diselesaikan.
3. Pemerintah daerah harusnya melihat dari sisi belanja pemerintah juga yaitu dengan memprioritaskan pembangunan daerahnya, terutama untuk dapat memberikan sarana dan prasarana seperti pembangunan jalan serta pembangunan sumber daya manusia yang lebih merata.
4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian yang telah penulis lakukan dengan melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alhiriani. *Pengaruh Investasi dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur di Provinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin, 2013.
- Bodie, dkk. *Investments Investasi*. Jakarta: Edisi Keenam. Salemba Empat, 2008.
- Boediono. *Ekonomi Moneter*. Edisi ketiga, BPFE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1992.
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan Dalam Angka in Figures, 2015.
- Cahyadi, Luh Diah Citra Resmi. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Industri di Kota Denpasar*. Denpasar: Program Pasca Sarjana. Universitas Udayana Denpasar. Tesis. 2013.
- Danawati<sup>1</sup>, Sri, dkk, *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali*. Jurnal. Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Departemen Agama RI, Al-Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemahannya. CV. Penerbit JART, 2005.
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 1997.
- Dwi Saputri, Oktaviana dan Tri Wahyu Rejekiningsih. *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja*. Gramedia Pustaka, 2007.
- Halim, Abdul. *Analisis Investasi*. Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Harijono, Gatot Setio. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja Melalui Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2006-2010*, Jurnal. Bali: Universitas Udayana, 2012.
- Kuncoro, Mudrajad, *Ekonomi Pembangunan :Teori Masalah, dan Kebijakan..* UPP AMP YKPN, 2000.
- Mangkoesebroto, Guripno. *Ekonomi Publik*. Edisi Ketiga: Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2013.
- Mankiw, Gregory. *Makroekonomi*. Jakarta: Edisi Keenam. Erlangga, 2006.



- Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Manululang, Sendjun H, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Citra, 1998.
- Nurafuah, *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah ( UKM ) di Provinsi Jawa Tengah*. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2015.
- Pratomo, Danang. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Karesidenan Surakarta Tahun 2000-2008*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelah Maret, 2011.
- Priambodo, Luthfi Setiya, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Riil dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Semarang*. Skripsi. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2014.
- Simanjuntak, Payman. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: UI-Press, 1985.
- Subijanto, *Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia* , Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* , Yogyakarta: Ekonosia-Kampus FE UII, 2007.
- Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Sumarsono, Sony, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003.
- Suroto. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.
- Teguh, Muhammad. *Ekonomi Industri*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* Trans Haris Munandar. Jakarta: Erlangga, 2000.
- Umar, Azis. *Pengaruh Investasi dan Upah Minimum Provinsi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri di Provinsi Sulawesi Selatan*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri. Skripsi. 2013.

Wignjosoebroto, Sritomo, *Pengantar Teknik & Manajemen Industri* Jakarta: Edisi Pertama, 2003.

Wicaksono, Reza, *Analisis Pengaruh PDB Sektor Industri, Upah Riil, Suku Bunga Riil dan Jumlah Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Pengolahan Sedang dan Besar di Indonesia Tahun 1990-2008*, Jurnal. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013.

Winarti, Astri. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan, Dan Pdb Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Periode 1992-2012*. Skripsi. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2014,

Yani, Ahmad. *Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sulawesi Selatan Periode 2000-2009*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin. Skripsi. 2011.

